

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

Kerjasama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang

TIM PENYUSUN

1. Winda Amrita Dessy, S.Tr Keb
2. Dina Herlin

Editor

Faizil Wardah, S.Si, ME

Desain Cover dan Layout

Syukrina Idris, Amd.Par
Aulia Prima Putri, S.Tr.Sos
Dina Herlin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Buku ini disusun dalam bentuk profil gender dan anak, sebagai salah satu upaya untuk menyediakan data terpilah dan analisis singkat tentang kondisi laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek, seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan perlindungan anak serta kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap buku Profil Gender dan Anak ini dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Kritik dan saran diperlukan agar buku ini lebih sempurna di masa yang akan datang.

Padang Panjang, September 2025

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Buku ini disusun dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketersediaan data terpilah dalam satu buku yang komprehensif dalam bentuk profil gender dan anak sangat diperlukan sebagai data dasar yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Buku Profil Gender dan Anak ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi pembangunan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang Tahun 2014. Buku ini disusun oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Akhir kata, terima kasih kepada tim penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian dan penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender di Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Padang Panjang



Dr. Osman Bin Nur.M.Si

NIP. 19690120 198902 1 001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

Editor

Desain Cover dan Layout

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	3
D. Hasil yang Diharapkan	3
E. Sumber Data	4
F. Geografis Kota Padang Panjang	4
BAB II KEPENDUDUKAN	6
A. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	7
1. Umur Median	8
2. Beban Ketergantungan	11
3. Grafik Penduduk	14
B. Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Padang Panjang	16
C. Penduduk menurut Kepemilikan KK, KTP dan Akte Kelahiran	17
1. Kepala Keluarga Menurut Kepemilikan KK	18
2. Kepemilikan KTP Di Kota Padang Panjang Tahun 2024	18
3. Kepemilikan Akte Kelahiran Di Kota Padang Panjang Tahun 2024	20
4. Kepemilikan Akte Kematian Di Kota Padang Panjang Tahun 2024	21
BAB III KESEHATAN	22
A. Cakupan Pertolongan Persalinan	22
B. Kunjungan Ibu Hamil Ke Posyandu dan Puskesmas	23
C. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)	25
D. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tetanus Toxoid (TT)	27
E. Penderita HIV/AIDS	27
F. Usia Kawin Pertama	28
G. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya	29
H. Keluarga Berencana	29
BAB IV KEPENDIDIKAN	33
A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan	33
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur	34
C. Sertifikasi Guru	35
BAB V EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	37
A. Penerima Bantuan untuk mengatasi Kemiskinan	37
B. Keanggotaan Koperasi	38
C. Tenaga Kerja	40

D. Pekerja Sektor Formal	42
E. Pekerja Sektor informal	43
F. Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin	44
BAB VI BIDANG POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
A. Partisipasi di Lembaga Legislatif	45
B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif	47
C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif	53
D. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik	59
E. Pengurus dan Anggota Kaukus Perempuan Politik	60
BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	61
A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	61
BAB VIII Kekerasan terhadap Perempuan	64
A. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Umur Tahun 2024	65
B. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan	66
BAB IX TUMBUH KEMBANG	70
A. Jumlah Peserta PAUD	71
B. Jumlah Lembaga PAUD	70
BAB X KELANGSUNGAN HIDUP	72
A. Angka Kematian Bayi	72
B. Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi	73
C. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Di Imunisasi	74
D. Jumlah Bayi Lahir Berat Badan Rendah	75
E. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan	76
F. Jumlah Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk	77
G. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2024	79
BAB XI PERLINDUNGAN ANAK	80
A. Kekerasan Terhadap Anak	80
B. Anak Jalanan	82
C. Pekerja Anak	83
D. Pekerja Rumah Tangga Anak	84
E. Anak Terlantar	84
F. Pekerja Anak Sektor Berbahaya	85
G. Anak Korban Eksploitasi Seksual	87
H. Anak Korban Pedofilia	88
J. Anak Berhadapan Dengan Hukum	89
K. Anak Penyandang Disabilitas	90
BAB XII KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK	93
A. Komitmen	93
B. Kebijakan dan Program	95
C. Kelembagaan	95
D. Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Prasarana	96
E. Data Terpilah	100
F. Dukungan Masyarakat Sipil	101
DAFTAR RUJUKAN	102

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Kota Padang Panjang menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	12
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Tahun 2022, 2023 dan 2024	13
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 5 : Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2024	17
Tabel 6 : Penduduk menurut Kepemilikan KTP di Kota Padang Panjang Tahun 2024	18
Tabel 7 : Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2024	19
Tabel 8 : Kepemilikan Akte Kematian di Kota Padang Panjang Tahun 2024	21
Tabel 9 : Cakupan Pelayanan Persalinan Fasilitas Layanan Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	22
Tabel 10 : Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	24
Tabel 11 : Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2024	25
Tabel 12 : Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	27
Tabel 13 : Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	27
Tabel 14 : Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang Menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2024	28
Tabel 15 : Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024	29
Tabel 16 : Jumlah PUS Peserta Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	30
Tabel 17 : Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022, 2023, 2024	32
Tabel 18 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang	33

menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022-2024

Tabel 19	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Tahun 2022-2024	34
Tabel 20	: Jumlah Sekolah Di Kota Padang Panjang Tahun 2024	35
Tabel 21	: Sertifikasi Guru di Kota Padang Panjang Tahun 2024	36
Tabel 22	: Jumlah Penerima Bantuan (orang) dan jenis bantuan yang diterima menurut kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang	37
Tabel 23	: Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024	39
Tabel 24	: Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Padang Panjang	40
Tabel 25	: Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Di Kota Padang Panjang	40
Tabel 26	: Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan 2023-2024	41
Tabel 27	: Pekerja Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	42
Tabel 28	: Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2024	43
Tabel 29	: Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2024	44
Tabel 30	: Jumlah Anggota DPRD di Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2022 – 2024	46
Tabel 31	: Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2024	48
Tabel 32	: Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2024	50
Tabel 33	: Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	52
Tabel 34	: Jumlah ASN daerah menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	53
Tabel 35	: Jumlah ASN menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	55
Tabel 36	: Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	56
Tabel 37	: Sekretaris OPD menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	57
Tabel 38	: Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	58
Tabel 39	: Jumlah Kepala Kelurahan menurut Jenis Kelamin di	58

	Kota	
	Padang Panjang Tahun 2024	
Tabel 40	: Pengurus Partai Politik di Level DPC menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	60
Tabel 41	: Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	62
Tabel 42	: Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2024	63
Tabel 43	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2024	65
Tabel 44	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	65
Tabel 45	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	66
Tabel 46	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	67
Tabel 47	: Jumlah Peserta Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	69
Tabel 48	: Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	70
Tabel 49	: Jumlah Kematian Bayi Sampai Umur 1 Tahun di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	72
Tabel 50	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2024	73
Tabel 51	: Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap di Kota Padang Panjang Tahun 2024	74
Tabel 52	: Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	75
Tabel 53	: Jumlah Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	76
Tabel 54	: Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	78
Tabel 55	: Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2024	79
Tabel 56	: Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	81
Tabel 57	: Jumlah Anak Jalanan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	83

Tabel 58	: Jumlah Pekerja Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	84
Tabel 59	: Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	84
Tabel 60	: Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	85
Tabel 61	: Jumlah Pekerja Anak di Sektor Bahaya menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	86
Tabel 62	: Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	87
Tabel 63	: Jumlah Anak Korban Pedofilia menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	88
Tabel 64	: Jumlah Anak Korban Trafiking menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	89
Tabel 65	: Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	90
Tabel 66	: Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	91
Tabel 67	: Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta di Kota Padang Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2024	92
Tabel 68	: Peraturan Daerah tentang PUG dan Perlindungan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024	94
Tabel 69	: Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/ Kegiatan yang Peduli Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024	95
Tabel 70	: Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024	96
Tabel 71	: Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024	96
Tabel 72	: Pendanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Padang Panjang Tahun 2024	97
Tabel 73	: Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024	101

DAFTAR GAMBAR

TABEL	Halaman
Gambar 1 : Peta Kota Padang Panjang	5
Gambar 2 : Grafik Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2022 -2024	15
Gambar 3 : Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	17
Gambar 4 : Grafik Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik di Kota Padang Panjang Tahun 2024	18
Gambar 5 : Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2024	20
Gambar 6 : Grafik Penduduk yang Memiliki Akte Kematian dan yang Tidak Memiliki Akte Kematian di Kota Padang Panjang Tahun 2024	21
Gambar 7 : Cakupan Pertolongan Persalinan Persentase Kelahiran oleh Dokter/Bidan menurut Kecamatan dan Penolong Persalinan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	23
Gambar 8 : Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	26
Gambar 9 : Usia Perkawinan Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2024	28
Gambar 10 : Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024	29
Gambar 11 : Jumlah PUS dan Peserta KB Serta Alat Kontrasepsi Di tahun 2023 dan 2024	31
Gambar 12 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan tahun 2022-2024	34
Gambar 13 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) tahun 2022-2024	35
Gambar 14 : Jumlah Sekolah Di Kota Padang Panjang	35
Gambar 15 : Sertifikasi Guru di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	36
Gambar 16 : Jumlah Penerima Bantuan (orang) dan jenis bantuan yang diterima menurut Kecamatan/Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	38
Gambar 17 : Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024	39
Gambar 18 : Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan kecamatan di Kota Padang Panjang 2024	40
Gambar 19 : Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	41
Gambar 20 : Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Kimia, Agro, dan Hasil	41

	Hutan Di Kota Padang Panjang 2023-2024	
Gambar 21	: Jumlah Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	42
Gambar 22	: Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2024	43
Gambar 23	: Jumlah Pencari kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	44
Gambar 24	: Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Panjang menurut Partai	47
	Politik dan jenis kelamin	
Gambar 25	: Jumlah Personil Pengadilan Negeri Berdasarkan Jabatan Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang	50
Gambar 26	: Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang	53
Gambar 27	: Jumlah ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	54
Gambar 28	: Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024	55
Gambar 29	: Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	57
Gambar 30	: Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	60
Gambar 31	: Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	62
Gambar 32	: Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Kelompok Umur Kota Padang Panjang Tahun 2024	63
Gambar 33	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	66
Gambar 34	: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan Di Kota Padang Panjang Tahun 2024	67
Gambar 35	: Jumlah Peserta PAUD di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	70
Gambar 36	: Jumlah Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non Formal Tahun 2022-2024	71
Gambar 37	: Jumlah Kematian Bayi sampai umur 1 tahun di Kota Padang Panjang tahun	73
Gambar 38	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2024	74
Gambar 39	: Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	75
Gambar 40	: Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	76
Gambar 41	: Jumlah Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	77
Gambar 42	: Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2022 -2024	78

Gambar 43	:	Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	81
Gambar 44	:	Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024	85
Gambar 45	:	Jumlah Anak dengan Kedisabilitasannya menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profil gender merupakan gambaran kondisi, partisipasi, dan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan yang dapat menjadi acuan dalam mengukur keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan Gender adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah: (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) infrastruktur, industri dan inovasi, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga ekosistem darat, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Kesetaraan gender mempunyai keterkaitan yang erat dengan semua tujuan yang ingin dicapai, karena semua tujuan pembangunan idealnya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender, perencanaan pembangunan idealnya berbasis data terpilah gender. Data terpilah gender menjadi dasar dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini diperlukan untuk melihat tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan suatu daerah. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan

gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sementara IDG

merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Akan tetapi, ketersediaan data terpilah pada masing-masing instansi masih relatif terbatas, sehingga perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data terpilah. Kondisi ini pada gilirannya akan berdampak terhadap munculnya ketimpangan gender. Selain itu, program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Apabila sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Untuk itu, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang menyusun profil gender, meliputi: *Pertama*, Daftar jenis data terpilah terdiri dari penduduk, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, Bidang politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosia budaya, dan kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, Daftar jenis data anak terdiri dari tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan perlindungan anak. *Ketiga*, Daftar jenis kelembagaan terdiri dari kelembagaan pengarus utamaan gender (PUG). Data pada buku ini dapat memberi gambaran pembangunan Kota Padang Panjang dalam dimensi gender. Buku profil gender dan anak ini berupa penyelenggaraan data gender dan anak yang bersifat lokal yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

B. Tujuan

Penyusunan buku profil gender dan anak ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak secara komprehensif.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah penyusunan data gender menyangkut semua isu di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan, data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, dan data kelembagaan PUHA di wilayah Kota Padang Panjang.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Buku profil gender dan anak Kota Padang Panjang Tahun 2025;
2. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
3. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sektoral dan berkoordinasi dengan BPS dalam penyelenggaraan data gender dan anak; dan
4. *Database* gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 berasal dari (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang Tahun 2024, (2) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024, (3) Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2024, (4) Polres Kota Padang Panjang Tahun 2024, (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Padang Panjang Tahun 2024, (6) Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kota Padang Panjang Tahun 2024, (7) Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2024, (8) Lembaga Masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2024, (9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang Tahun 2024, (10) KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024, (11) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan, (12) BAZDA Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Buku Profil Gender Tahun 2025 memuat data Tahun 2024 dan perbandingan dengan data Tahun 2022 dan 2023 pada beberapa kelompok sesuai data yang tersedia. Perbandingan ini dimaksudkan agar dapat dilihat progres pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tiga tahun terakhir.

F. Geografis Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang terletak pada dataran tinggi (Daerah Pegunungan) dengan ketinggian antara 550-900 meter di atas permukaan laut, dengan posisinya yang diapit oleh tiga gunung, yaitu: Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, sehingga udaranya sejuk. Suhu udara rata-rata adalah 22,3⁰ C dengan kelembaban udara 86,92⁰ C. Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Secara Geografis Padang Panjang terletak antara 100⁰ 20' dan 100⁰ 30' Bujur Timur serta 0⁰ 27' dan 0⁰ 32' Lintang Selatan.

Secara detail batas-batas Kota Padang Panjang adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X koto
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto



Gambar 1. Peta Kota Padang Panjang

BAB II KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu aspek vital yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Disamping sebagai objek pembangunan, penduduk sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu, data tentang penduduk penting diterbitkan secara berkala. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 point 9 menyatakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data agregat merupakan kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Data kependudukan berbasis gender perlu selalu dimutakhirkan secara berkala setiap tahunnya, karena data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender dan berkelanjutan, baik untuk perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pada aspek tertentu, seperti perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan ketenagakerjaan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Data penduduk juga dapat digunakan untuk alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan. Agar pembangunan dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dibutuhkan data penduduk terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah penduduk laki-laki dan perempuan disebut juga dengan data terpilah gender. Melalui data terpilah gender dapat ditemukan isu-isu gender dan dapat pula digunakan untuk menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Kebijakan dan program responsif gender terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya.

A. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data terpilah laki-laki dan perempuan pada kelompok umur ini dapat dihitung dan ditentukan umur median, beban ketergantungan dan rasio jenis kelamin pada masing-masing kelompok umur interval lima tahunan. Rasio jenis kelamin juga dapat dihitung pada kelompok umur produktif dan tidak produktif. Selain itu, data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur juga dapat diketahui komposisi penduduk laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk	
		L	Kumulatif	P	Kumulatif		Kumulatif
1	0 – 4	3.010	3.010	2.880	2.880	5.890	5.890
2	5 – 9	2.520	5.530	2.480	5.360	5.000	10.890
3	10 – 14	2.440	7.970	2.250	7.610	4.690	15.580
4	15 – 19	2.590	10.560	2.370	9.980	4.950	20.530
5	20 – 24	2.510	13.070	2.350	12.330	4.860	25.390
6	25 – 29	2.470	15.540	2.520	14.850	5.000	30.390
7	30 – 34	2.380	17.920	2.450	17.300	4.830	35.220
8	35 – 39	2.250	20.170	2.130	19.430	4.380	39.600
9	40 – 44	2.010	22.180	1.940	21.370	3.940	43.540
10	45 – 49	1.910	24.090	1.760	23.130	3.660	47.200
11	50 – 54	1.630	25.720	1.630	24.760	3.250	50.450
12	55 – 59	1.410	27.130	1.440	26.200	2.850	53.300
13	60 – 64	1.120	28.250	1.170	27.370	2.290	55.590
14	65 – 69	780	29.030	880	28.250	1.650	57.240
15	70 – 74	480	29.510	670	28.920	1.150	58.390
16	75 +	370	29.880	680	29.600	1.050	59.450
Jumlah		29.880		29.600		59.450	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2024.

Data tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 59.450 Jiwa, terdiri dari 29.880 jiwa (50,26%) laki-laki dan 29.600 jiwa (49,62) Perempuan. Bila dibandingkan dengan data Tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki mengalami Penurunan sebanyak 1.703 orang. Sementara penduduk perempuan pada Tahun 2023 adalah 31.193 berkurang menjadi 29.600 orang pada Tahun 2024, dengan berkurangnya 1.593 orang. Berbeda halnya dalam satu tahun terakhir ini, jumlah penduduk perempuan maupun laki-laki menunjukkan Penurunan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada Tahun 2023 adalah 62.731 orang kemudian berkurang 59.450 pada Tahun 2024, dengan berkurangnya 3.281 orang.

Selanjutnya berdasarkan data struktur umur dan jenis kelamin di atas, dapat dihitung dan ditentukan: umur median, beban ketergantungan, rasio jenis kelamin pada setiap kelompok umur. Selain itu, juga dapat digambarkan piramida penduduk pada tahun yang sama seperti di bawah ini.

1. Umur Median

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian yang sama, bagian yang pertama lebih muda, dan bagian yang kedua lebih tua. Jika umur median < 20 tahun maka penduduk termasuk pada struktur umur muda, bila umur median 20-30 tahun maka penduduk termasuk pada umur intermediate. Selanjutnya, bila umur median lebih dari 30 tahun berarti penduduk suatu daerah termasuk pada struktur umur tua. Struktur umur penduduk suatu daerah juga dapat ditentukan dengan menghitung persentase penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun, dan persentase penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas. Penduduk berstruktur umur muda apabila persentase umur 0-14 tahun adalah > 35 persen, dan umur 65 tahun ke atas adalah < 3 persen. Sebaliknya, apabila persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun adalah < 35 persen, dan kelompok umur 65 tahun ke atas adalah > 15 persen maka penduduk termasuk pada struktur umur tua. Umur median dalam konteks ini dilihat umur secara keseluruhan laki-laki dan perempuan, dan pada masing-masing jenis kelamin.

Umur Median Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024

$$Md = Imd + \left(\frac{n/2 - f_x}{f_{Md}} \right) \times i$$

I_{Md} = Batas kelompok umur yang mengandung $N/2$

N = Jumlah penduduk total

F_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

F_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

I = Kelas interval umum

$$\begin{aligned} Md &= 25 + \left(\frac{\frac{59.450}{2} - 14.175}{2.839} \right) \times 5 \\ &= 25 + \left(\frac{31.365,5 - 14.175}{2.839} \right) \times 5 \\ Md &= 25 + (6,0551) \times 5 \\ &= 25 + 30,27 \\ &= 55,27 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tabel 1 diperoleh umur median penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 sebesar 28 tahun. Sama halnya dengan umur median penduduk Padang Panjang Tahun 2022 maupun Tahun 2023 (Profil Gender Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan 2022), umur median penduduk Kota Padang Panjang pada ketiga tahun tersebut berstruktur umur intermediate. Artinya struktur umur penduduk di Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir ini merupakan kelompok umur transisi dari umur muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*). Berdasarkan struktur umur ini, Kota Padang Panjang mempunyai sumber daya manusia yang besar, yang dapat menopang pembangunan kota, karena sebagian besar penduduk berada pada umur produktif atau berada pada posisi bonus demografi.

Berikut adalah umur median berdasarkan dimensi gender, laki dan perempuan, yang menggambarkan tentang struktur umur penduduk laki-laki dan perempuan.

Data umur median ini dapat diperbandingkan struktur umur penduduk laki-laki dan perempuan, apakah termasuk kelompok umur muda atau kelompok umur tua.

Umur median laki-laki Tahun 2024:

$$\begin{aligned}
 Md &= 25 + \left(\frac{\frac{29.880}{2} - 13.070}{2.510} \right) \times 5 \\
 &= 25 + \left(\frac{14.940 - 13.070}{2.561} \right) \times 5 \\
 Md &= 25 + (0.7450) \times 5 \\
 &= 25 + 3.72 \\
 &= 28,72
 \end{aligned}$$

Umur median perempuan Tahun 2024:

$$\begin{aligned}
 Md &= 25 + \left(\frac{\frac{29.600}{2} - 12.330}{2.350} \right) \times 5 \\
 &= 25 + \left(\frac{14.800 - 12.330}{2.575} \right) \times 5 \\
 Md &= 25 + (0,6710) \times 5 \\
 &= 25 + 3.355 \\
 &= 28.35
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan umur median di atas, diperoleh umur median penduduk laki-laki Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 28 lebih 7 bulan tahun, sementara untuk perempuan adalah 28 lebih 3 bulan. Sedangkan Umur median penduduk laki-laki kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 28 lebih 1 bulan tahun, dan umur median penduduk perempuan adalah 29 lebih 6 bulan, Berdasarkan hasil perhitungan di atas, umur median penduduk laki-laki dan perempuan selama dua tahun terakhir ini menunjukkan dinamika tetapi masih termasuk kategori umur intermediate. Artinya selama dua tahun terakhir Ini tidak ada perbedaan umur median antara penduduk

laki-laki dan perempuan di Kota Padang Panjang, meskipun median umur penduduk perempuan sedikit lebih tua dibanding umur median penduduk laki-laki.

2. Beban Ketergantungan

Struktur umur dalam relasinya dengan kegiatan produktif secara ekonomi dapat dibagi atas tiga kelompok besar, yakni usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Penduduk usia 0-14 tahun disebut sebagai penduduk usia muda yang dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian juga halnya secara umur, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap penduduk tidak produktif lagi karena sudah melewati masa produktif. Dengan demikian berdasarkan usia produktif secara ekonomi, penduduk usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk yang menjadi beban tanggungan bagi usia produktif. Sementara penduduk usia 15-64 tahun yang disebut juga dengan penduduk usia produktif secara ekonomi.

Berdasarkan ketiga kelompok struktur umur tersebut dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk suatu daerah, baik rasio ketergantungan penduduk umur muda, umur tua maupun secara total. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk produktif. Indikator ini erat hubungannya dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Angka ketergantungan berbanding terbalik dengan ketercapaian pembangunan. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik kondisi ekonomi suatu daerah, karena penduduk non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk produktif makin sedikit.

Data tabel 2 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023, penduduk Kota Padang Panjang yang terbanyak adalah pada umur produktif, yakni 42.187 jiwa (67,25%). Kemudian penduduk belum produktif (umur muda) 16.449 jiwa (26,22%) dari

jumlah keseluruhan penduduk. Sementara penduduk usia (65 tahun keatas) atau kelompok umur tua adalah 4.095 jiwa (6,52%) dari keseluruhan penduduk.

Berikut adalah sebaran penduduk usia produktif dan tidak produktif berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki usia produktif adalah 21.225 jiwa (67,29 %), sedangkan perempuan usia produktif adalah 20.962 jiwa (67,20 %). Jumlah penduduk usia produktif laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan usia produktif. Sama halnya dengan jumlah penduduk usia muda, jumlah laki-laki pada usia belum produktif juga sedikit lebih banyak (27,18%) dibanding jumlah perempuan belum produktif (25,24 %), dengan selisih 1,94 persen. Sedangkan pada usia tua (65 tahun ke atas) jumlah penduduk laki-laki sebanyak (5,51%), pada penduduk perempuan sebanyak (7,61%), dengan selisih 2,1 persen.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Kota Padang Panjang menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	laki-laki		Perempuan		Total	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
0-14 Tahun (Umur Muda)	7.970	26.67	7.610	25.70	15.580	26.20
15-64 Tahun (Umur Produktif)	20.280	67.87	19.760	66.75	40.040	67.35
65 tahun ke atas	1.630	5.45	2.230	7.53	3.860	6.49
Jumlah	29.880		29.600		59.450	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024

Atas dasar konsep usia produktif secara ekonomi juga dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, yang disebut dengan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

- **Rasio Ketergantungan Muda** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15-64 tahun.
- **Rasio Ketergantungan Tua** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun

Konsepsi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Tahun 2022, 2023, 2024

Kelompok Umur	Rasio Ketergantungan tahun 2022 (%)	Rasio Ketergantungan tahun 2023 (%)	Rasio Ketergantungan tahun 2024(%)
	Total	Total	Total
0-14 Tahun (Umur Muda)	40.34	38.99	26.20
>65 Tahun (Umur Tua)	9.17	9.71	6.49
Angka ketergantungan Total	49.51	48.7	32.69

Sumber: Analisis data penduduk tahun 2022,2023,2024

Data tabel 3 memperlihatkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. Angka ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebesar 32.69. Artinya, setiap 100 orang penduduk berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 32.69 orang penduduk tidak produktif.

Angka ini disumbangkan oleh dominasi penduduk muda sebesar 26.20 persen, dan penduduk tua 6.49 persen. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, angka ini menunjukkan jumlah yang tidak sama yaitu sebesar 48.7 persen. Angka ini disumbangkan 38.99 dari rasio ketergantungan penduduk muda, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,71 persen. Sedangkan pada Tahun 2022 rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang sedikit lebih besar, yakni 49,51 persen, dan penyumbang terbesar, yakni 40.34 tetap pada umur muda.

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3, pada Tahun 2022, 2023, dan

2024, beban ketergantungan hampir mencapai angka 50 persen, dan penyumbang terbesar adalah penduduk usia muda. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki pada rasio ketergantungan muda lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Tetapi pada rasio ketergantungan tua, proporsi perempuan justru lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding penduduk laki-laki.

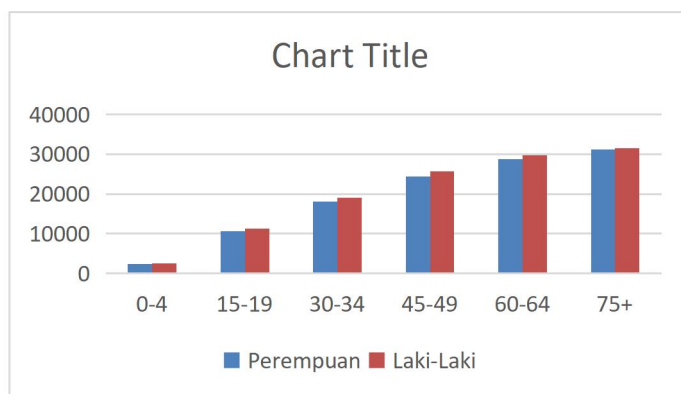
Dengan demikian berdasarkan struktur umur di atas dapat disimpulkan bahwa, Kota Padang Panjang saat ini sama halnya dengan Tahun 2022 dan 2023, berada pada masa bonus demografi, yang ditunjukkan dari jumlah penduduk usia produktif melebihi dari angka 50 persen, yakni 54.38 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan penduduk tidak produktif. Banyaknya jumlah produktif menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang berada pada bonus demografi. Hal ini sangat menguntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang kesempatan kerja (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu daerah sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif. Paling tidak ada empat manfaat dari banyaknya jumlah penduduk usia produktif, yakni: (1) dapat meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang, apabila jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin besar, (2) membentuk generasi emas, yakni generasi yang diharapkan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun Kota Padang Panjang, (3) meringankan beban hidup, karena beban yang harus ditanggung lebih sedikit, dan (4) bonus demografi dapat menjadi modal daerah.

3. Grafik Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin juga dapat disajikan secara visual pada sebuah grafik yang disebut dengan Piramida Penduduk. Grafik Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas secara vertikal untuk kelompok umur yang lebih tua.

Puncak puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan kelompok umur terbuka (65+ ataupun 75+). Bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Piramida penduduk juga dibedakan atas tiga ciri, yaitu ekspansif (*Espansive*) dimana pada ciri ini mempunyai lebar pada bagian dasar piramida yang menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ciri kedua adalah Konstruktif (*Construktive*) dimana pada ciri ini bagian dasar piramida kecil dan bagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda. Ciri ketiga adalah Stasioner (*Stationary*) yaitu bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.



Gambar 2. Grafik Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024

B. Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data penduduk perkecamatan diperlukan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Selain itu komposisi penduduk berdasarkan

jenis kelamin juga dapat menggambarkan sex ratio di suatu wilayah.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Total	SR
		L	P		
I	Padang Panjang Timur	13.958	13.724	27.682	107.70
1	Kel. Ganting	1.784	1.738	3.522	102.64
2	Kel. Sigando	1.106	1.037	2.143	106.65
3	Kel. Ekor Lubuk	1.416	1.362	2.778	103.96
4	Kel. Ngalau	1.735	1.774	3.509	97.80
5	Kel. Guguk Malintang	3.635	3.695	7.330	98.37
6	Kel. Koto Panjang	2.551	2.439	4.990	104.59
7	Kel. Koto Katik	715	661	1.376	108.16
8	Kel. Tanah Pak Lambik	1.016	1.018	2.034	99.80
II	Padang Panjang Barat	18.231	17.982	36.213	101.38
1	Kel. Bukit Surungan	1.360	1.414	2.774	96.18
2	Kel. Pasar Usang	2.010	1.995	4.005	100.75
3	Kel. Kampung Manggis	4.129	3.966	8.095	104.10
4	Kel. Silaing Bawah	3.338	3.275	6.613	101.92
5	Kel. Silaing Atas	1.271	1.253	2.524	101.43
6	Kel. Pasar Baru	879	860	1.739	102.20
7	Kel. Tanah Hitam	1.927	1.969	3.896	97.86
8	Kel. Balai-Balai	3.317	3.250	6.567	102.06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 4 dapat dilihat rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Padang Panjang Timur adalah 107.70, dan di Kecamatan Padang Panjang Barat adalah 101.38. Artinya rasio jenis kelamin penduduk di kedua kecamatan Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat menunjukkan bahwa, jumlah laki-laki dan perempuan cenderung lebih banyak di kecamatan Padang Panjang Barat.

C. Penduduk menurut Kepemilikan KK, KTP dan Akte Kelahiran

1. Kepala Keluarga menurut Kepemilikan KK

Tabel 5. Jumlah Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Keluarga	Jumlah KK yang sudah dicetak	Jumlah KK yang belum dicetak
1	Padang Panjang Timur	27.682	81.82	81.69	3
2	Padang Panjang Barat	36.213	10.920	10.886	34
	Total	63.895	19.102	19.055	37

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2024.



Gambar 3. Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel memperlihatkan jumlah KK dan jumlah KK yang memiliki kartu keluarga yang sudah dicetak/dimiliki. Jumlah Kepala Keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 63.895 KK, Dari jumlah KK tersebut, sebagian besar sudah memiliki KK dengan data tercatat 19.102 Keluarga . Hanya sebagian kecil yang belum memiliki KK dengan data 37 keluarga. Bila dilihat per kecamatan, KK yang sudah memiliki KK, jumlahnya berbeda di kedua kecamatan. Di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat 81.69 keluarga yang telah memiliki KK dan 3 keluarga yang belum memiliki KK, sedangkan di Padang Panjang Barat terdapat 10.886 keluarga yang telah memiliki KK dan 34 Keluarga yang belum memiliki KK.

Dapat disimpulkan dari kedua kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang 99,75% yang sudah memiliki KK dan 0,19% yang belum memiliki KK, jadi sebagian besar warga Kota Padang Panjang sudah terdata dan memiliki KK.

2. Kepemilikan KTP

Data tabel dibawah menunjukkan jumlah penduduk Wajib KTP pada Tahun 2024 yang sudah dan belum memiliki KTP. Jumlah wajib KTP adalah 45.231 orang. Yang sudah memiliki KTP Elektronik adalah 99,13 persen, sisanya 0,86 persen yang belum memiliki KTP Elektronik. Jumlah terbanyak yang sudah memiliki KTP Elektronik terdapat di Padang Panjang Barat, yakni 56,38 persen, dan di Padang Panjang Timur adalah 42,74 persen. Hal ini karena wajib KTP lebih banyak berdomisili di Padang Panjang Barat. Kemudian dari 0,86 persen penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik.

Tabel 6. Penduduk menurut Kepemilikan KTP di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	Belum Memiliki KTP Elektronik
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	19.498	19.335	163
2	Padang Panjang Barat	25.733	25.505	228
Padang Panjang		45.231	44.840	391

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024



Gambar 4. Grafik Kepemilikan KTP Kota Padang Panjang Tahun 2024

3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat [1] dan ayat [2] juga menegaskan bahwa identitas setiap diri anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam bentuk Akte Kelahiran. Data tentang Akte Kelahiran secara vital dapat menggambarkan jumlah kelahiran setiap tahunnya, sekaligus dapat digunakan untuk perencanaan pelayanan kesehatan anak dan Ibu.

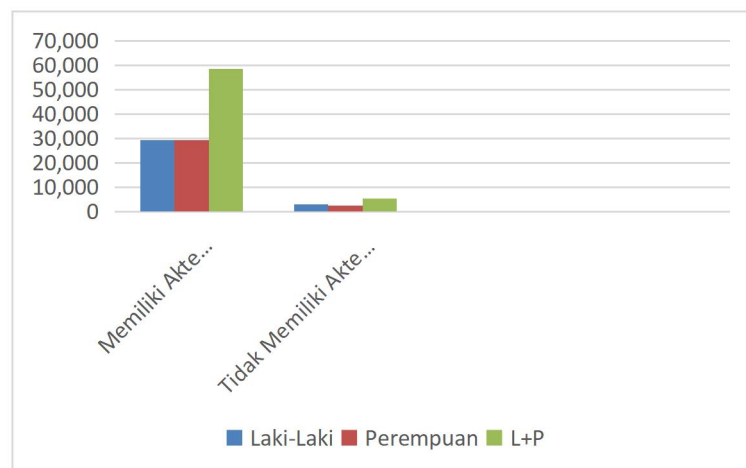
Berdasarkan tabel data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, dapat dilihat total penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada Tahun 2024 yakni sebanyak 58.536 orang (98,46 %), dan yang belum memiliki Akte Kelahiran adalah 5.359 orang (9,01%). Jumlah penduduk yang belum memiliki Akte kelahiran tersebut terdapat di Padang Panjang Barat sebanyak 2.959 orang dan di Padang Panjang Timur 2.400 orang. Artinya berdasarkan domisilinya, penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran lebih banyak berdomisili di Padang Panjang Barat.

Tabel 7. Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Memiliki Akte Kelahiran			Tidak Memiliki Akte Kelahiran		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Padang Panjang Timur	12.666	12.616	25.282	1.292	1.108	2.400
2	Padang Panjang Barat	16.619	16.635	33.254	1.612	1.347	2.959
Kota Padang Panjang		29.285	29.251	58.536	2.904	2.455	5.359

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024

Selanjutnya dari tabel juga dapat dilihat jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Penduduk laki-laki yang belum memiliki akte kelahiran adalah 2.904 orang (9,91%) dan perempuan adalah 2.455 orang (8,39%). Data ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang belum memiliki akte kelahiran dibanding penduduk perempuan.



Gambar 5. Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Kota Padang Panjang Tahun 2024

4. Kepemilikan Akte Kematian

Kepemilikan Akta Kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang meninggal setiap tahunnya, sehingga bisa dilakukan penghitungan angka kematian seperti angka kematian menurut umur, angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian anak. Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, jumlah kematian yang dilaporkan dan tercatat dalam bentuk Akte Kematian selama tahun 2024 adalah 395 jiwa. Data tersebut juga tersebar di dua kecamatan di Padang Panjang. Semua jumlah kematian di Padang Panjang Tahun 2024 sudah dilaporkan dan tercatat dalam sistem pencatatan data kematian penduduk.

Tabel 8. Kepemilikan Akte Kematian Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Meninggal			Memiliki Akta Kematian		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Padang Panjang Timur	97	75	172	97	75	172
2	Padang Panjang Barat	122	101	223	122	101	223
	Kota Padang Panjang	219	176	395	219	176	395

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024



Gambar 6. Grafik Kepemilikan Akte Kematian Kota Padang Panjang Tahun 2024

BAB III KESEHATAN

Analisis gender terkait kesehatan pada bagian ini difokuskan kepada kesehatan Ibu mencakup: pertolongan persalinan, kunjungan Ibu hamil ke Posyandu dan Puskesmas, Ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe), Ibu hamil yang mendapatkan *Tetanus Toxoid* (TT), dan penderita HIV/AIDS. Data kesehatan Ibu penting untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, sekaligus untuk menentukan program dan kebijakan penanganan, pemenuhan

hak kesehatan reproduksi perempuan.

A. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan yang ideal adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar (bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya di fasilitas kesehatan). Ada beberapa alasan kenapa pertolongan persalinan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, yakni: (1) agar ibu hamil dan bayi dapat secara cepat dan tepat mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar, (2) mengenali secara dini tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, dan (3) mendapatkan pertolongan pertama gawat darurat dengan cepat sebagai persiapan upaya rujukan ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

Tabel 9. Cakupan Pelayanan Persalinan Fasilitas Layanan Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Persalinan Di FASYANKES	
		Puskesmas	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	Koto Katik	162
		Gunung	128
2	Padang Panjang Barat	Bukit Surungan	191
		Kebun Sikolos	286
	Kota Padang Panjang		767

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diketahui jumlah kelahiran pada Tahun 2024 adalah 767 orang, terdiri dari 290 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur, dan 477 orang di Kecamatan Padang Panjang Barat. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang semua persalinan di tolong oleh dokter/bidan. Artinya semua persalinan sudah ditolong oleh tenaga medis. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga medis sudah tinggi.



Gambar 7. Cakupan Pelayanan Persalinan Fasilitas Layanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024

B. Kunjungan Ibu Hamil Ke Posyandu dan Puskesmas

Kunjungan ke Posyandu bagi ibu hamil sangat diperlukan mengingat pemeriksaan dan pemberian tablet Fe biasanya dilaksanakan di Posyandu oleh bidan. Banyak kendala yang dihadapi petugas untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu antara lain, pengetahuan ibu, jarak Posyandu yang relatif jauh, persepsi masyarakat/ibu tentang Posyandu itu sendiri. Masyarakat masih perlu dibina dan diajak untuk selalu berkunjung ke Posyandu, agar kesehatan bayi, balita dan ibu hamil lebih terjaga sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih terjamin untuk generasi berikutnya.

Pemeriksaan kehamilan yang disebut juga dengan *Antenatal Care* (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik Ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan yang lengkap adalah K1, K2, K3, dan K4. Selama pemeriksaan kehamilan, Ibu hamil akan mendapatkan serangkaian pelayanan terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya gangguan kesehatan selama kehamilan.

Tabel 10. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan 2022		Jumlah Kunjungan 2023		Jumlah Kunjungan 2024	
		K1	K4	K1	K4	K1	K4
1	Padang Panjang Timur	392	374	356	385	343	277
2	Padang Panjang Barat	589	544	570	521	528	491
	Jumlah	981	918	926	906	871	768

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel menunjukkan jumlah Ibu hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang melakukan kunjungan k1 adalah sebanyak 871 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 528 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Timur 343 orang. Sedangkan Tahun 2023 ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 adalah 926 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 356 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 570 orang dan Tahun 2022 yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 981 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 589 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Timur 392 orang. Ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 di Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebanyak 768 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 544 orang dan Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 374 orang. Sedangkan Tahun 2023 ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 di Kota Padang Panjang sebanyak 906 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 385 orang, dan Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 521 orang dan Tahun 2022 sebanyak 918 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 544 orang dan Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 374 orang. Dari tiga tahun ini kunjungan ibu hamil K1 dan K4 cenderung menurun dari tahun ke tahun dari data tersebut perlunya sosialisasi lebih kepada para ibu hamil agar bisa memeriksakan kehamilan secara berkelanjutan.

C. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi digunakan untuk membentuk hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke organ-organ dan jaringan. Pada saat Ibu

hamil, tubuh memproduksi persediaan darah tambahan untuk Ibu dan bayi yang dikandung. Tubuh akan membutuhkan zat besi ekstra untuk pembentukan persediaan darah tersebut dan juga untuk mendukung percepatan pertumbuhan bayi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kadar zat besi bagi Ibu selama kehamilannya. Jika Ibu hamil tidak mencukupi asupan zat besi harian, maka mereka akan mudah merasa lelah dan terserang infeksi. Selain itu, juga beresiko bayi lahir dengan berat di bawah normal akan meningkat. Defisiensi zat besi dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, anemia, terutama pada ibu hamil.

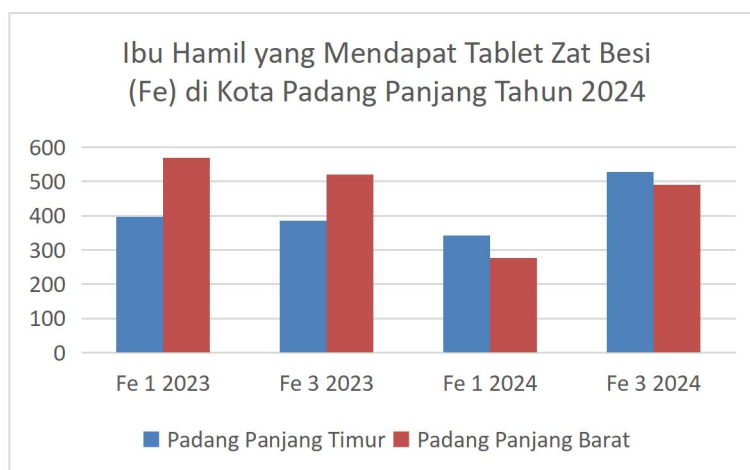
Tabel 11. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	2023		2024	
		Fe 1	Fe 3	Fe 1	Fe 3
1	Padang Panjang Timur	396	385	343	277
2	Padang Panjang Barat	570	521	528	491
	Jumlah	966	906	871	768

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel dapat dilihat bahwa Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1) di Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebanyak 871 orang di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 528 orang dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 343 orang ibu hamil yang mendapat zat besi (Fe 1). Sedangkan ibu hamil yang mendapat zat besi (Fe 3) di Kota Padang Panjang sebanyak 768 orang. Di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 491 orang dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 277 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3). Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 ibu hamil yang mendapatkan zat besi Tahun 2024 berkurang ibu hamil yang mendapatkan zat besi Fe 1 dan Fe 3. Pada Tahun 2023 ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe 1) di Kota Padang Panjang sebanyak 966. Di

Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 570 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 1). Di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat sebanyak 396 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 1). Sedangkan ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe 3) di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebanyak 906. Di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 521 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3). Di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat sebanyak 385 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3).



Gambar 8. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024

D. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tetanus Toxoid (TT)

Imunisasi TT bagi perempuan hamil sangat diperlukan karena tetanus merupakan penyakit yang juga dapat terjadi pada bayi yang lahir pada kondisi persalinan tidak higienis atau ibunya tidak mendapatkan vaksinasi tetanus. Ketika ibu hamil menerima vaksin, tubuh ibu akan membentuk antibodi yang kemudian diteruskan kepada janin sebagai bentuk perlindungan alami selama dalam kandungan dan beberapa bulan setelah kelahiran.

Tabel 12. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	TT Pada Ibu Hamil 2024
1	Padang Panjang Timur	308
2	Padang Panjang Barat	377

	Jumlah	685
--	--------	-----

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat terdapat ibu hamil yang memperoleh Imunisasi Tetanus Toxid di Kota Padang Panjang Tahun 2024. Pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang ibu hamil yang memperoleh Imunisasi Tetanus Toxid sebanyak 308 Di Kecamatan Padang Panjang Timur. Di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 377 Orang ibu hamil yang mendapat imunisasi TT, Angka ini belum termasuk ibu hamil yang mendapatkan TT dari dokter atau bidan swasta.

E. Penderita HIV/AIDS

Tabel 13. Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kecamatan	1-24tahun		25-49 tahun		>50 tahun	
	L	P	L	P	L	P
KotaPadang Panjang	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan tabel pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa tidak ada penderita HIV/AIDS di Kota Padang Panjang.

F. Usia Kawin Pertama

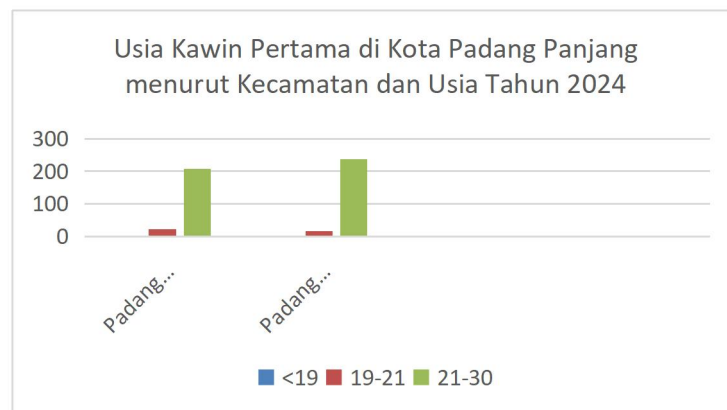
Usia kawin di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Perkawinan di bawah usia 19 tahun, berarti perkawinan di bawah umur atau usia anak. Perkawinan anak akan beresiko terhadap kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan bayi.

Tabel 14. Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2024

Kecamatan	Usia Kawin Pertama (Tahun)								Jumlah	
	Pria				Wanita				Pria	Wanita
	<19	19-21	21-30	≥30	<19	19-21	21-30	≥30		
Padang Panjang Barat	0	9	208	0	1	14	202	0	217	217
Padang Panjang Timur	1	6	121	0	1	10	117	0	128	128
Total	1	15	329	0	2	24	319	0	345	325

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024

Data tabel menunjukkan bahwa usia kawin pertama di Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada umumnya adalah di atas 19 tahun. Data ini menunjukkan bahwa usia kawin pertama di Kota Padang Panjang tidak sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan secara kesehatan. Di daerah ini selama Tahun 2024 ditemukan 3 pasangan yang menikah di bawah umur, atau perkawinan anak.



Gambar 9. Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2024

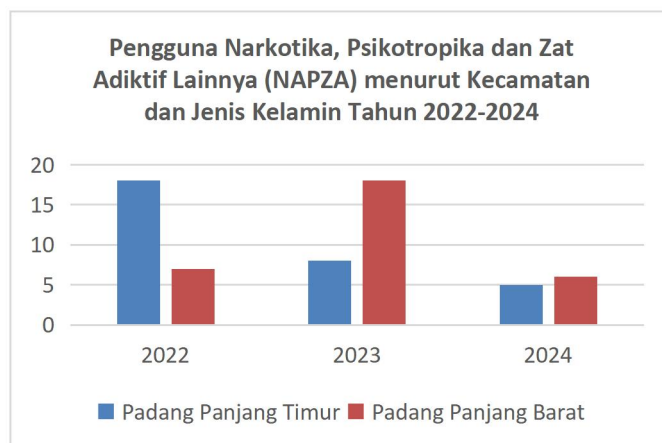
G. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Tabel 15. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024			
				JLH KASUS	TSK	BB	
						GANJA	SABU
1	PADANG PANJANG BARAT	7	18	6	17	103,91	83.45
2	PADANG PANJANG TIMUR	18	8	5	6		
JUMLAH TOTAL		25	26	11	23	103,91	83.45

Sumber: Kapolres Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang Tahun 2024 terdapat sebanyak 11 kasus pengguna NAPZA dengan 23 orang tersangka. Angka tersebut menurun dari tahun 2022 dan 2023 sebanyak 25 dan 26 kasus pengguna NAPZA.



Gambar 10. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024

H. Keluarga Berencana

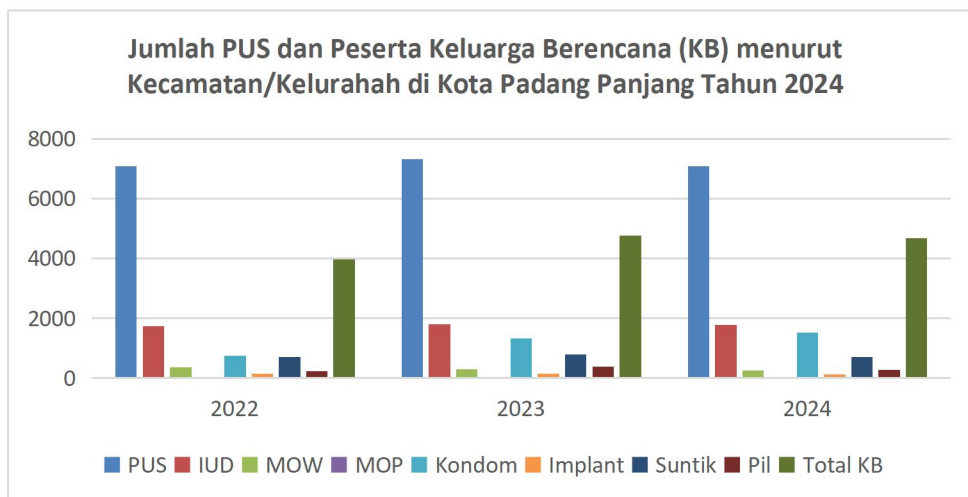
Berdasarkan tabel dapat dilihat, jumlah PUS di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 7.307 pasang, 4.069 pasang (55,68%) terdapat di Kecamatan Padang Panjang Barat, 3.238 pasang (44,31 %) di Kecamatan Padang Panjang Timur. Dari jumlah tersebut, 4.753 pasang (65,04 %) diantaranya adalah peserta KB, yang tersebar di Padang Panjang Barat sebanyak 2.669 pasang (56,15%), dan 2.084 pasang (43,84%) di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Tabel 16. Jumlah PUS dan Peserta Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan/Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah PUS	Akseptor KB							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Inplant	Suntik	Pil	Total
Padang Panjang Barat	3929	969	142	5	827	59	415	202	2619
Persentase (%)		24.66	3.61	0.12	21.04	1.50	10.56	5.14	66.65
1. Silaing Bawah	803	179	35	1	188	13	79	60	555
2. Pasar Usang	389	90	10	1	132	2	67	25	327
3. Silaing Atas	234	67	16		56	1	11	8	159
4. Kampung Manggis	1006	285	37		151	23	101	41	638
5. Tanah Hitam	500	125	11	2	76	12	77	27	330
6. Pasar Baru	119	36	3		43	1	8	4	95
7. Bukit Surungan	306	63	10		63	4	24	9	173
8. Balai-Balai	572	124	20	1	118	3	48	28	342
Padang Panjang Timur	3152	806	122	6	693	62	282	74	2045

Persentase (%)			25.57	3.87	0.19	21.98	1.96	8.94	2.34	64.87
1. Koto Panjang		576	156	22	2	111	16	44	6	357
2. Koto Katik		177	46	14	0	26	2	14	9	111
3. Ngalau		435	134	14	0	89	6	50	12	305
4. Ekor Lubuk		310	74	11	0	87	5	33	9	219
5. Sigando		256	71	9	0	57	7	15	8	167
6. Ganting		429	96	23	0	76	18	42	11	266
7. Guguk Malintang		745	179	15	3	181	8	65	11	462
8. Tanah Pak Lambiak		224	50	14	1	66	0	19	8	158
Jumlah	2024	7081	1775	264	11	1520	121	697	276	4664
	%		25.06	3.72	0.15	21.46	1.70	9.84	3.89	65.86
	2023	7307	1797	300	14	1334	141	784	383	4753
	%		24.59	4.10	0.19	18.25	1.92	10.72	5.2	65.04

Sumber: Analisis Data Dinas Sosial P2KBP3A, 2024



Gambar 11. Jumlah PUS dan Peserta KB Serta Alat Kontrasepsi Tahun 2023 dan 2024

Selanjutnya dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat jumlah PUS selama dua tahun terakhir. Jumlah PUS pada Tahun 2023 adalah 7.307 pasang, turun menjadi 7.081 pasang pada Tahun 2024. Jumlah peserta KB pada Tahun 2023 adalah 4.753 pasang, turun menjadi 4.664 pada Tahun 2024. Penggunaan alat kontrasepsi yang dominan pada rentang Tahun 2023-2024 yaitu alat

kontrasepsi berupa IUD dan kondom. Suntikan juga merupakan alat kontrasepsi yang cukup banyak dipilih oleh PUS.

Data tabel menunjukkan bahwa peserta KB berdasarkan jenis kelamin, masih didominasi oleh peserta KB perempuan, baik pada Tahun 2023, 2024. Perbandingan jumlah peserta KB pada Tahun 2023 antara perempuan dan laki-laki adalah 4 : 1, pada Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya adalah 4:1. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi, meskipun secara absolut jumlah akseptor KB perempuan lebih signifikan dibandingkan dengan peserta KB laki-laki.

Tabel 17. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan di Kota Padang Panjang Tahun 2023,2024

No	Jenis Alat KB	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat	
		2023	2024	2023	2024
Peserta KB Perempuan					
1.	IUD	871	806	926	959
2.	MOW	127	122	173	142
3.	Implant	64	62	77	59
4.	Suntik	291	282	493	415
5.	Pil	119	74	264	202
Peserta KB laki-laki					
1.	MOP	5	6	9	5
2.	Kondom	607	693	727	827

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Lebih lanjut jumlah peserta KB laki-laki di Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebanyak 1.531 peserta. Di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 699 peserta terdiri dari MOP 6 peserta dan Kondom 693 peserta. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 832 peserta KB, yang terdiri dari peserta MOP sebanyak 5 dan kondom 827 peserta. Jumlah peserta KB Laki-laki di Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024 selalu mengalami peningkatan.

BAB IV KEPENDIDIKAN

Pada Bab IV tentang Kependidikan dibahas Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, sertifikasi guru, dan lain-lain. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan. APS hanya salah satu indikator kualitas pendidikan, lainnya ada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA

APK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak Tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

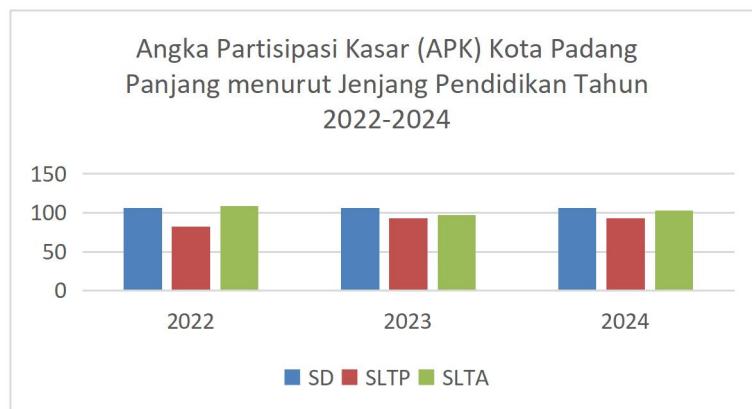
Tabel 18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022-2024

No	Kab/Kota	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1	Padang Panjang	106.51	82.02	109.73	106.07	93.36	97.51	106.61	93.10	103.39

Sumber: Padang Panjang dalam angka tahun 2024

Berdasarkan data tabel 18 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kota Padang Panjang Tahun 2022,2023,2024 lebih dari 100. Hal ini disebabkan ada dua kemungkinan, pertama peserta didik yang bersekolah di SD di Kota Padang Panjang pada ketiga tahun tersebut melebihi usia sekolah sederajat. Kedua peserta didik yang saat ini bersekolah di kota Padang Panjang berasal dari luar Kota Padang Panjang. Sedangkan di SMP pada tahun 2023 mengalami

peningkatan dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan, sedangkan di SMA tahun 2023 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan di tahun 2024. Dapat di simpulkan angka partisipasi kasar di kota Padang Panjang yang paling besar di tingkat SD sedangkan di tingkat SMP dan SMA masih mengalami naik turun dalam angka yang drastis.



Gambar 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022-2024

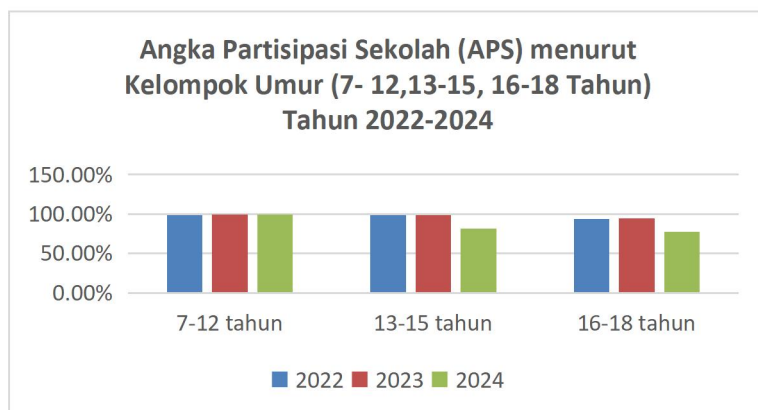
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun)

Tabel 19. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) Tahun 2022-2024

No	Kab/Kota	Umur (2022)			Umur (2023)			Umur (2024)		
		7-12	13-15	7-12	13-15	7-12	13-15	7-12	13-15	16-18
1	Padang Panjang	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	99.35	81.28	77.24

Sumber: Buku Padang Panjang dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun atau SD di Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 99.35. Angka ini mengindikasikan bahwa ada anak usia sekolah SD yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah



Gambar 13. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7- 12,13-15, 16-18 Tahun) Tahun 2022-2024

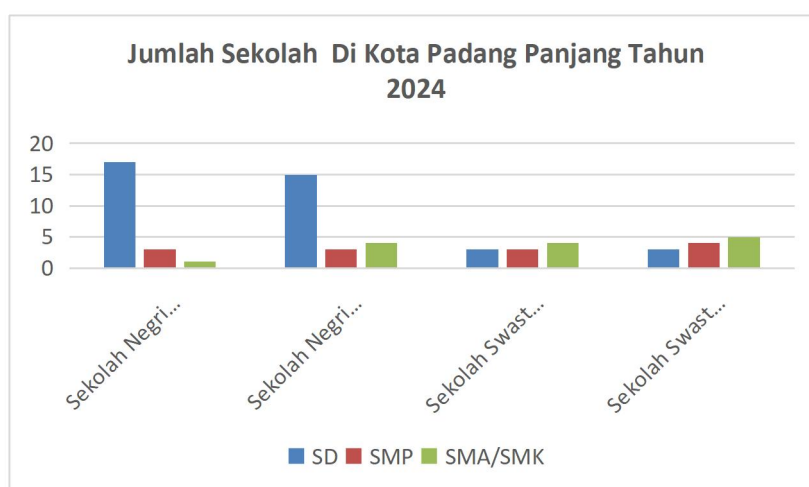
C. Sertifikasi Guru

Tabel 20. Jumlah Sekolah Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Sekolah (Negeri)			Jumlah Sekolah (Swasta)			Jumlah		
		SD	SMP	SMA/ SMK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/ SMK
1	Padang Panjang Barat	17	3	1	3	3	4	20	6	5
2	Padang Panjang Timur	15	3	4	3	4	2	18	7	6
	Total	32	6	6	6	7	5	38	13	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Di kota Padang Panjang sekolah Negeri lebih dominan dari pada Sekolah Swasta di SD,SMP,maupunSMA/SMK.



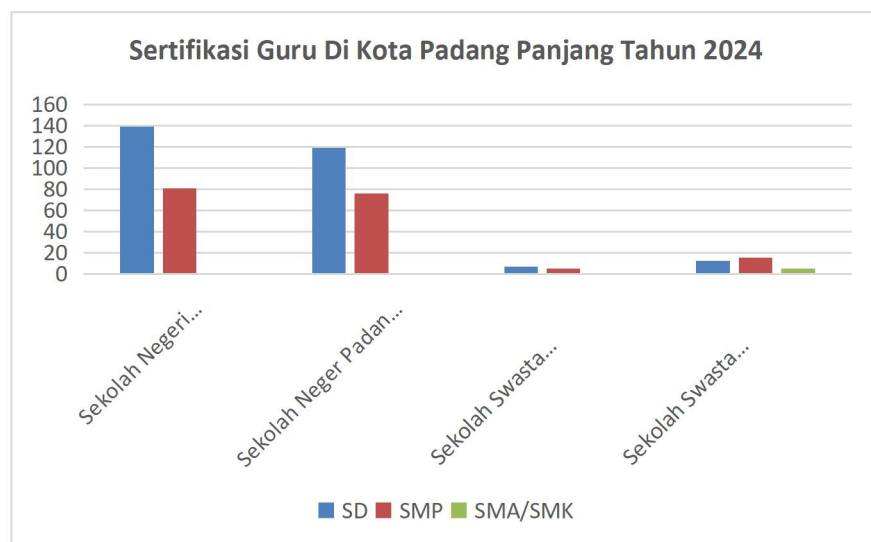
Gambar 14. Jumlah Sekolah Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Tabel 21. Sertifikasi Guru Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Guru (Negeri)			Jumlah Guru (Swasta)			Jumlah		
		SD	SMP	SMA/ SMK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/ SMK
1	Padang Panjang Barat	139	81	-	7	5	-	146	86	-
2	Padang Panjang Timur	119	76	-	12	15	-	131	91	-
	Total	258	157	-	19	20	-	277	177	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 21, guru yang memiliki sertifikat pendidik di Kota Padang Panjang Tahun 2024 terbanyak pada jenjang SD yaitu 277 orang, sedangkan pada jenjang SMP sebanyak 177 dan pada jenjang SMA tidak ada. Jumlah itu sudah mencakup Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.



Gambar 15. Sertifikasi Guru Sekolah Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

BAB V EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

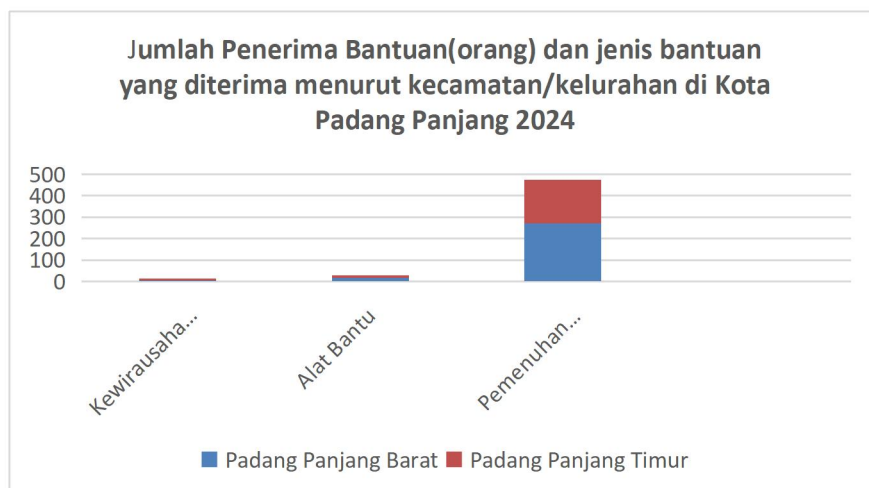
A. Penerima Bantuan untuk mengatasi Kemiskinan

Tabel 22. Jumlah Penerima Bantuan (orang) dan jenis bantuan yang diterima menurut kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang 2024

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penerima Bantuan	Jenis Bantuan		
		Kewirausahaan	Alat Bantu	Pemenuhan Hidup Layak
Silaing Bawah	55	0	3	52
Silaing Atas	39	1	3	35
Pasar Usang	37	0	2	35
Kampung Manggis	52	1	3	48
Tanah Hitam	39	0	3	36
Pasar Baru	18	2	1	15
Bukit Surungan	16	0	0	16
Balai-Balai	37	1	2	34
Padang Panjang Barat	293	5	17	271
Koto Panjang	48	1	5	42
Koto Katik	31	4	0	27
Ngalau	29	2	0	27
Ekor Lubuk	25	0	1	24
Sigando	29	0	2	27
Ganting	30	0	2	28
Guguk Malintang	23	0	1	22
Tanah Pak Lambik	8	1	0	7
Padang Panjang Timur	223	8	11	204
Kota Padang Panjang	516	13	28	475

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 22 Jumlah Penerima Bantuan (orang) dan jenis bantuan yang diterima menurut kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang 2024. Dengan jenis bantuan yang terbagi yaitu Kewirausahaan, Alat Bantu, Pemenuhan Hidup Layak. Dari data Di kota Padang Panjang jumlah Penerima Bantuan Dari 2 Kecamatan sebanyak 516 di antaranya Kewirausahaan 13 orang, Alat Bantu 28 Orang, dan Pemenuhan Hidup Layak 475 Orang.



Gambar 16. Jumlah Penerima Bantuan(orang) dan jenis bantuan yang diterima menurut kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang 2024

B. Keanggotaan Koperasi

Tidak dapat dipungkiri, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi merupakan salah satu upaya yang demokratis. Artinya koperasi memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara setara, baik laki-laki, perempuan, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Hal ini karena koperasi merupakan organisasi atau badan usaha yang dijalankan oleh sejumlah anggota untuk mencapai tujuan bersama. Masing-masing anggota koperasi akan mengemban tugas dan tanggung jawab bersama, mengacu pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Setiap anggota juga memiliki hak suara yang sama untuk mengambil keputusan yang dicapai melalui musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan berada di tangan anggota melalui rapat anggota tahunan atau RAT. Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 24.

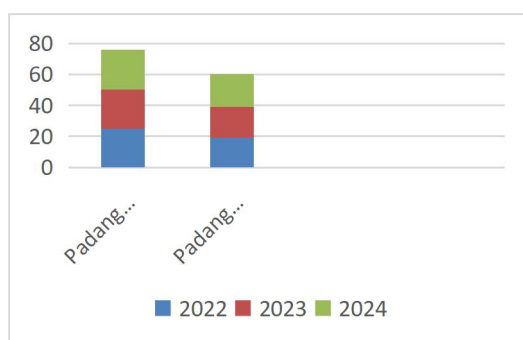
Tabel 23 Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun

2022-2024

Kelurahan/Kecamatan	2022	2023	2024
Silaing Bawah	4	4	6
Silaing Atas	1	1	1
Pasar Usang	10	10	10
Kampung Manggis	1	1	1
Tanah Hitam	1	1	1
Pasar Baru	2	2	2
Bukit Surungan	4	4	4
Balai-Balai	2	2	1
Padang Panjang Barat	25	25	26
Koto Panjang	1	1	1
Koto Katik	-	-	-
Ngalau	2	2	3
Ekor Lubuk	1	1	1
Sigando	-	1	1
Ganting	3	3	3
Guguk Malintang	9	9	9
Tanah Pak Lambik	3	3	3
Padang Panjang Timur	19	20	21
Kota Padang Panjang	44	45	47

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2024

Data tabel 23 menunjukkan bahwa terdapat 47 koperasi Aktif di Kota Padang Panjang Tahun 2024, terdiri dari 26 di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 21 Koperasi Di Padang Panjang Timur. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 45 Koperasi, namun di tahun 2022 yaitu 47 koperasi aktif.



Gambar 17. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kelurahan/Kecamatan Tahun 2022-2024

Tabel 24. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Di Kota Padang Panjang 2024

No	Kab/Kota	Jenis Koperasi					
		KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Total
1	Kec. Padang Panjang Barat	1	7	3	1	14	26
2	Kec. Padang Panjang Timur	0	15	0	0	6	21
	Jumlah	1	22	3	1	20	47

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan Kecamatan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 26. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 21. Tabel menunjukkan bahwa jenis koperasi di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih banyak daripada Kecamatan Padang Panjang Timur.



Gambar 18. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Di Kota Padang Panjang 2024

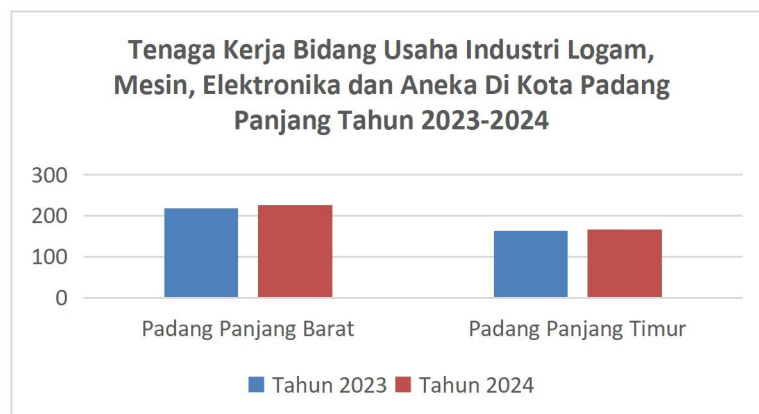
C. Tenaga Kerja

Tabel 25. Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Di Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Padang Panjang Barat	218	226
2	Padang Panjang Timur	163	166
	Jumlah	381	392

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan angka terbanyak di kecamatan Padang Panjang Barat berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024, dan dalam dua tahun ini terjadi peningkatan pada tahun 2024.



Gambar 19. Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan aneka Di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023

Tabel 26. Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Padang Panjang Barat	739	800
2	Padang Panjang Timur	689	711
	Jumlah	1.428	1.511

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Di simpulkan data dari 2023 sebanyak 1.428 dan pada 2024 sebanyak 1.511 dari angka tersebut dapat di lihat peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 20. Tenaga Kerja Bidang Usaha Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Di Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024

D. Pekerja Sektor Formal

Sektor usaha formal adalah sektor usaha yang mendapat wewenang dan izin dari pemerintah dan sudah terdaftar resmi di kantor pemerintah. Sektor usaha formal

sudah terdaftar di kantor perdagangan, kantor industri dan juga kantor perpajakan. Sementara pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja, plus berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) tentang Ketenagakerjaan.

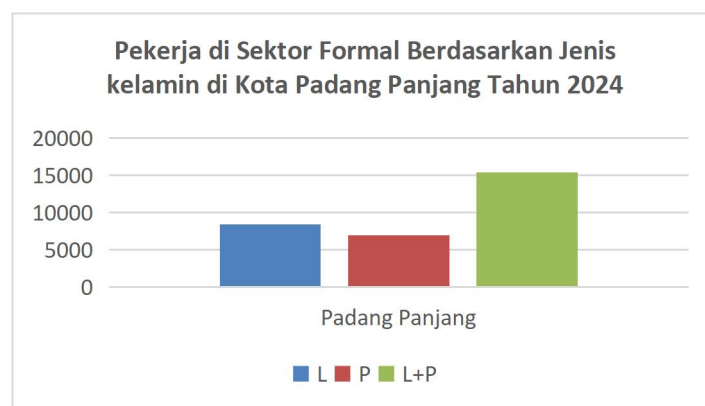
Tabel 27. Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kota	Jenis kelamin		L+P
		L	P	
1	Padang Panjang	8.449	6.977	15.426
	Jumlah	8.449	6.977	15.426

Sumber: PM PTSP Tahun 2024

Data tabel 27 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang terdapat 15.426 orang pekerja sektor formal, yang terdiri dari 8.449 pekerja laki-laki dan 6.988 orang perempuan. Data ini juga memberi gambaran bahwa pekerja sektor formal masih lebih banyak jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan.

Gambar 22. Jumlah Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024



E. Pekerja Sektor informal

Berbeda dengan pekerja sector formal, pekerja sector informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha

dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar (<https://sirusa.bps.go.id>).

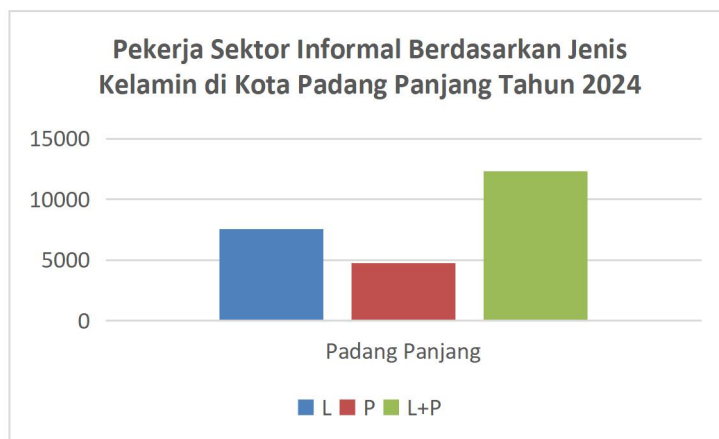
Tabel 28. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kota	Jenis kelamin		L+P
		L	P	
1	Padang Panjang	7.577	4.742	12.319
	Jumlah	7.577	4.742	12.319

Sumber: Dinas PMPTSP Tahun 2024

Data tabel 28 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang terdapat sebanyak 12.319 orang penduduk yang bekerja di sektor informal. Sebanyak 7.577 orang laki-laki dan 4.742 orang perempuan. Tidak berbeda dengan pekerja sektor formal, pekerja sektor informal juga didominasi oleh laki-laki.

Gambar 23. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024



F. Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin

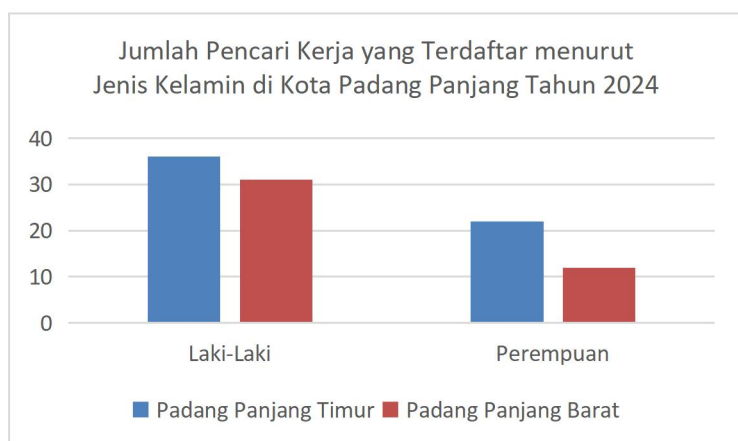
Pencari kerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

Tabel 29. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	36	31	67
2	Padang Panjang Timur	22	12	34
	Jumlah	58	43	101

Sumber: Dinas PMPTSP Tahun 2024

Data tabel 29 menunjukkan bahwa terdapat 101 orang pencari kerja yang terdaftar di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024. Pencari kerja di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih banyak dari pada pencari kerja di Kecamatan Padang Panjang Timur. Dari sisi jenis kelamin, pencari kerja laki-laki juga lebih banyak dibanding pencari kerja perempuan.



Gambar 24. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2023

BAB VI

BIDANG POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Partisipasi di Lembaga Legislatif

Demokrasi menghendaki partisipasi semua pihak, laki-laki dan perempuan. Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara demokrasi. Secara konstitusional hak politik warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan global SDGs yakni *gender equality*, khususnya kesetaraan gender dalam bidang politik. Di Indonesia secara konstitusional perempuan sebagai warga negara dijamin haknya baik sebagai pemilih maupun sebagai yang akan dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di lembaga legislatif telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Salah satu upaya kesetaraan gender dalam politik adalah dengan *affirmative action* melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Undang-undang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Selain itu, partai politik diizinkan mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jumlah minimum 30% dalam pengambilan keputusan publik memungkinkan terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga publik. Namun demikian, yang jauh lebih

penting lagi dibandingkan keterwakilan perempuan adalah sensitifitas gender para anggota dewan baik laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel. Anggota DPRD Kota Padang Panjang hasil Pemilu untuk periode 2024 berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dua orang perempuan masing-masing berasal dari partai Nasdem, Partai Gerindra, Amanat Nasional dan partai Demokrat. Bila dilihat dari harapan quota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, angka ini masih relatif kecil, yakni 20 persen. Representasi perempuan di partai politik masih mengalami persoalan terkait dengan kebijakan partai, nilai-nilai di dalam masyarakat, kepercayaan diri perempuan dan kemampuan ekonomi. Dengan kata lain, perempuan masih mengalami banyak kendala dalam partisipasi politik baik dari aspek struktur, kultur, proses sosial dan faktor individual.

Tabel 30. Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	PARTAI	Jenis Kelamin		
		L	P	L+P
1	Partai Nasdem	3	1	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
4	Partai Golongan Karya	2	0	2
5	Partai Gerindra	2	1	3
6	Partai Demokrat	1	1	2
7	Partai Amanat Nasional	3	1	4
8	Partai Bulan Bintang	2	0	2
Jumlah		16	4	20

Sumber: KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan hasil pemilu Tahun 2019, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan. Karena pada pemilu Tahun 2024 terdapat empat orang perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang Panjang.



Gambar 25. Jumlah Anggota DPRD di Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.

Komposisi anggota DPRD Kota Padang Panjang dilihat dari komisi dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 30. Dapat dilihat bahwa dua orang anggota DPRD perempuan masing-masing berada satu orang pada Komisi 1 dan satu orang pada Komisi 2. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam rapat-rapat komisi. Apalagi kalau keputusan-keputusan politik di DPRD harus diambil melalui voting, maka suara perempuan akan mengalami kekalahan.

B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

Penegakan hukum yang *responsive gender* sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu kehadiran perempuan sebagai penegak hukum menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan sistem hukum dan penegakan hukum yang *responsive gender* dan inklusif, selain juga meningkatkan sensitifitas gender para penegak hukum laki-laki. Hal ini sejalan dengan banyaknya isu-isu hukum yang menimpa perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya yang memerlukan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu keterwakilan perempuan di Lembaga Yudikatif dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi urgent. Selain diamanatkan konstitusi, keberadaan perempuan di Lembaga Yudikatif diharapkan dapat memperbaiki cara pandang hukum agar *responsive gender*, yakni mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Perspektif gender dalam penegakan hukum diperlukan sejak proses

pemeriksaan, penyidikan, penahanan, dan perlindungan di LAPAS. Perspektif gender mempertimbangkan kekhususan perempuan terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi dan konstruksi sosial gender. Selanjutnya, perspektif gender juga sangat diperlukan dalam penanganan korban. Karena perempuan sebagai korban sering diperlakukan secara tidak adil karena kuatnya kultur patriarkhi. Tidak jarang perempuan korban kejahatan justru mendapatkan perlakuan yang bias gender dari penegak hukum. Untuk itu, selain jumlah perempuan di lembaga penegakan hukum, yang juga perlu ditingkatkan adalah sensitifitas penegak hukum baik laki-laki maupun perempuan. Pada tabel 33 disajikan data tentang representasi perempuan di Lembaga Yudikatif di Kota Padang Panjang.

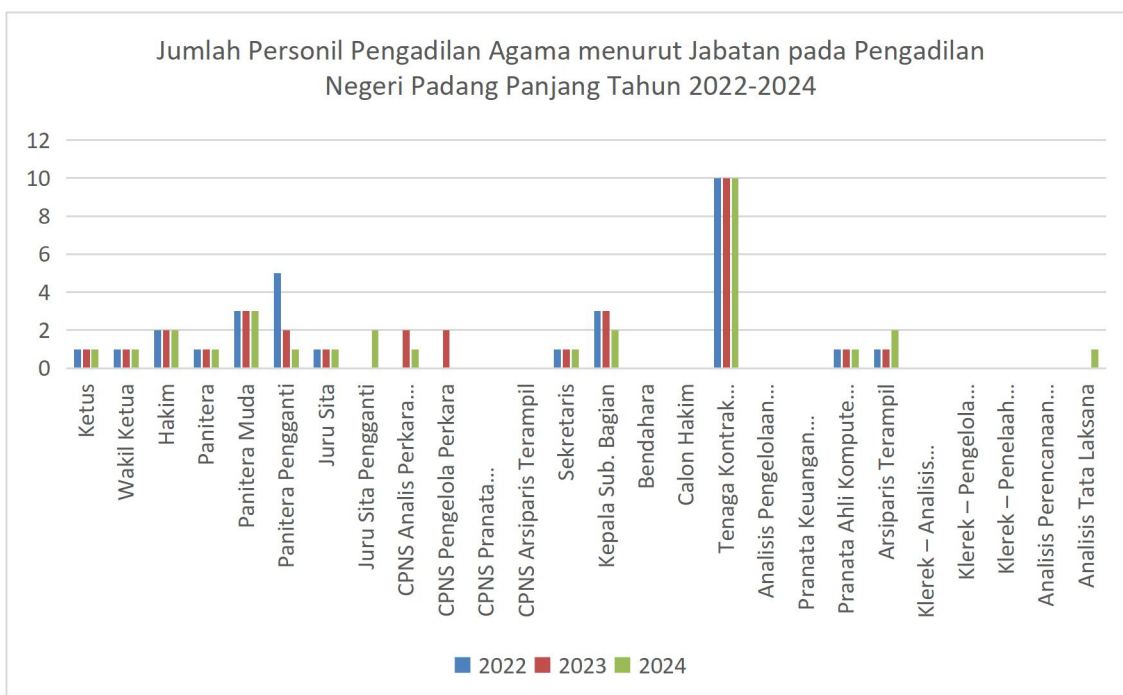
Tabel 31. Jumlah Personil Pengadilan Agama menurut Jabatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Jenis Jabatan Hakim	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Ketua	-	1	1	-	1	1	-	1	1
2	Wakil Ketua	1	-	1	-	1	1	-	1	1
3	Hakim	1	1	2	1	1	2	1	1	2
4	Panitera	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	Panitera Muda	2	1	3	1	2	3	1	2	3
6	Panitera Pengganti	1	4	5	-	2	2	1	-	1
7	Juru Sita	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Juru Sita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	2	2
9	CPNS Analis Perkara Peradilan	-	-	-	2	-	2	1	-	1
10	CPNS Pengelola Perkara	-	-	-	-	2	2	-	-	0
11	CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CPNS Arsiparis Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekretaris	1	-	1	-	1	1	-	1	1
14	Kepala Sub. Bagian	2	1	3	2	1	3	1	1	2
15	Bendahara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17	Tenaga Kontrak (PPNPN)	7	3	10	7	3	10	7	3	10
	Jabatan Fungsional Tertentu									
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pranata Keuangan APBN Penyedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pranata Ahli Komputer Ahli Pertama	-	1	1	-	1	1	-	1	1
21	Arsiparis Terampil	-	1	1	-	1	1	-	2	2
	Pelaksanaan									
22	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Klerek – Pengelola Penanganan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Analisis Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	17	13	30	15	16	31	15	15	30

Sumber: Pengadilan Negeri Tahun 2024

Data tabel 31 menunjukkan bahwa personil Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 30 orang anggota terdapat 15 anggota perempuan. Perempuan mempunyai posisi sebagai Ketua 1 orang, wakil ketua 1 orang, hakim 1 orang, panitera muda 2 orang, Juru Sita pengganti 2 orang, Secara grafis representasi perempuan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 26.



Gambar 26. Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022-2024

Tabel 32. Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Jenis Jabatan Hakim	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Ketua	-	1	1	1	-	1	1	-	1
2	Wakil Ketua	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Hakim	1	3	4	1	-	1	1	3	4
4	Panitera	-	1	1	-	1	1	-	1	1
5	Panitera Muda	-	3	3	-	3	3	-	1	1
6	Panitera Pengganti	1	1	1	2	1	3	2	1	3
7	Juru Sita	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Juru Sita Pengganti	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9	CPNS Klerik - Analis Perkara Peradilan	3	-	3	-	-	-	-	1	1
10	CPNS Pengelola Perkara	-	2	2	-	-	-	-	-	-
11	CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CPNS Arsiparis Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekretaris	1	-	1	1	-	1	-	1	1
14	Kepala Sub. Bagian	3	-	3	3	-	4	3	-	3

15	Bendahara	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tenaga Kontrak	7	1	8	7	1	8	7	1	8
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU									
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	-	-	1	-	1	1	-	1
19	Pranata Keuangan APBN Penyelia	-	-	-	1	-	1	1	-	1
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1	1	-	1	-	-	-
21	Arsiparis Terampil	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	PELAKSANAAN									
22	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	-	-	-	3	-	3	-	-	-
23	Klerek – Pengelola Penanganan	-	-	-	-	2	2	-	2	2
24	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	Jumlah	22	13	35	24	10	34	19	12	31

Sumber: Pengadilan Negeri Tahun 2024

Di Pengadilan Agama Kota Padang Panjang pada Tahun 2022, terdapat 4 orang Hakim, sama dengan Tahun 2022. Tetapi pada tahun 2023 jumlah hakim berkurang drastis menjadi 1 orang saja dan itu pun laki-laki saja, Selanjutnya yang perlu diupayakan adalah bagaimana para hakim perempuan dapat menjadi aktor atau agen bagi perwujudan keadilan bagi perempuan dan laki-laki terutama dalam penyelesaian masalah keluarga dan pemutusan perkawinan. Hal ini penting karena masih banyak pemutusan perkawinan/perceraian yang merugikan pihak perempuan karena hak-hak mereka setelah perceraian tidak dilindungi dalam keputusan pengadilan. Fakta menunjukkan tidak ada sanksi yang tegas bagi laki-laki yang tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian.

Penegak hukum berikutnya adalah kepolisian. Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di dalam masyarakat. Kepolisian juga merupakan lembaga penegak hukum formal tahap pertama dan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu representasi perempuan dan sensitifitas gender polisi sangat diperlukan dalam penegakan hukum agar setiap orang, laki-laki dan perempuan, disabilitas, anak serta kelompok marginal

lainnya diperlakukan secara adil dan setara. Kepolisian dalam meningkatkan layanan yang responsive gender telah menyediakan program pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Unit PPA Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Terdapat tiga fungsi UPPA, yakni: (1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, (2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, (3) penyelenggaraan Kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait. Instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, P2TP2A, Komnas Perempuan, Komnas Anak, LMS Peduli Perempuan dan Anak, dan lain-lain.

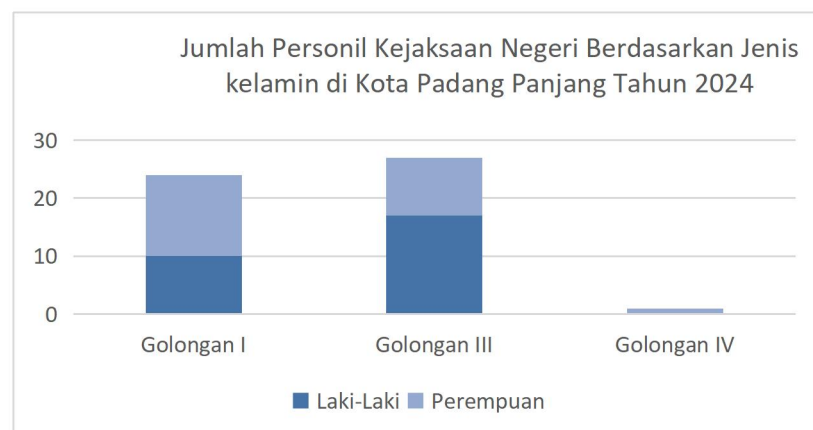
Selanjutnya representasi perempuan di Lembaga Yudikatif juga dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di Lembaga Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Golongan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Golongan II	10	14	24
2	Golongan III	17	10	27
3	Golongan IV	0	1	1
	Jumlah	27	25	52

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 33 menunjukkan bahwa terdapat 27 orang laki-laki dan 25 orang perempuan di Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Keterlibatan perempuan di lembaga Kejaksaan memungkinkan terjadinya penuntutan yang *responsive gender*.



Gambar 27. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif

Indikator kesetaraan gender dalam bidang politik berikutnya adalah representasi perempuan di Lembaga Eksekutif. Representasi perempuan di Lembaga Eksekutif tidak hanya dilihat sebagai sebuah jumlah, tetapi juga harus dilihat sebagai sebuah kualitas. Kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepangkatan serta posisi di level pimpinan. Di Kota Padang Panjang partisipasi perempuan di Lembaga Eksekutif dapat dilihat pada jumlah ASN dan Jabatan yang diduduki.

Tabel 34. Jumlah ASN Daerah menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Jenis Jabatan PNS	PNS 2022		L+P	PNS 2023		L+P	PNS 2024		L+P
		L	P		L	P		L	P	
1	Fungsional Umum	328	326	654	287	226	513	281	219	500
2	Fungsional Tertentu	232	778	1010	237	826	1063	233	809	1042
3	Eselon II	20	5	25	22	4	26	21	5	26
4	Eselon III	59	31	90	56	34	90	53	30	83
5	Eselon IV	74	64	138	78	64	142	75	59	134
	Jumlah	713	1204	1917	680	1154	1834	663	1122	1785

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024

Data tabel 34 menunjukkan bahwa jumlah ASN perempuan lebih banyak

dibandingkan jumlah ASN laki-laki baik pada Tahun 2022, 2023 dan 2024. Perempuan lebih banyak mengisi posisi fungsional tertentu (seperti guru dan perawat) dengan jumlah mencapai 809 orang di Tahun 2024. Namun masih sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi Eselon dua dan tiga. Data ini juga menggambarkan bahwa posisi posisi pimpinan masih lebih banyak dipegang oleh ASN laki-laki, meskipun secara jumlah ASN perempuan lebih banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam promosi pegawai sehingga kompetensi perempuan dapat bermanfaat secara optimal. Analisis gender terhadap promosi SDM juga perlu dipertimbangkan, karena perempuan seringkali terhalang karena gendernya. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 28.



Gambar 28. Jumlah ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

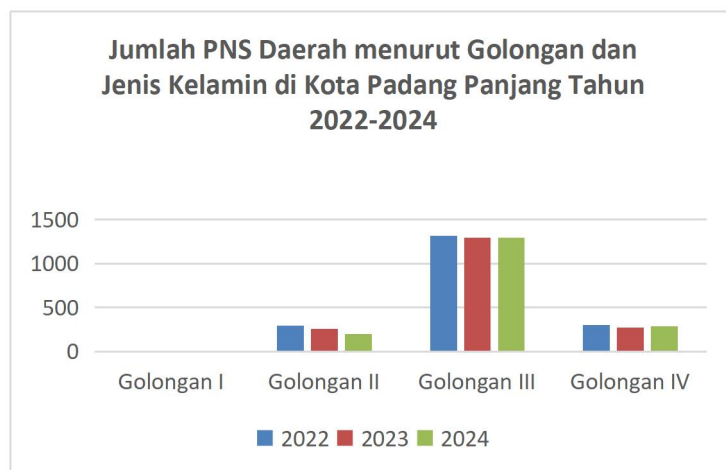
Kualitas ASN juga dapat dilihat dari pangkat dan golongan yang dicapai. Secara umum bila dilihat dari sisi kepangkatan, kecenderungan semakin tinggi kepangkatan, semakin sedikit representasi perempuan. ASN Kota Padang Panjang berdasarkan kepangkatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Jumlah PNS Daerah menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

Golongan Ruang Kepangkatan PNS	PNS 2022		L+P	PNS 2023		L+P	PNS 2024		L+P
	L	P		L	P		L	P	
Golongan I	10	1	11	9	1	10	7	1	8
Golongan II	160	130	290	138	117	255	101	95	196
Golongan III	430	887	1317	428	867	1295	445	852	1297
Golongan IV	113	186	299	107	167	274	110	174	284
Jumlah	713	1204	1917	682	1152	1834	663	1122	1785

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024.

Data tabel 35 menunjukkan bahwa jumlah PNS Daerah setiap tahun mengalami penurunan. Tapi kalau dikelompokkan menurut golongan pada tahun 2024 jumlah terbanyak terdapat di golongan III sebanyak 1.297 atau 72,66 persen. Dan yang mendominasi oleh laki-laki Sedangkan pada golongan I memiliki jumlah yang terendah tidak mencapai di angka 8 dibandingkan dengan data Tahun 2022 dan 2023, mengalami peningkatan jumlah untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 29.



Gambar 29. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

Kualitas ASN berikutnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan mempunyai peran penting mensukseskan ASN dalam

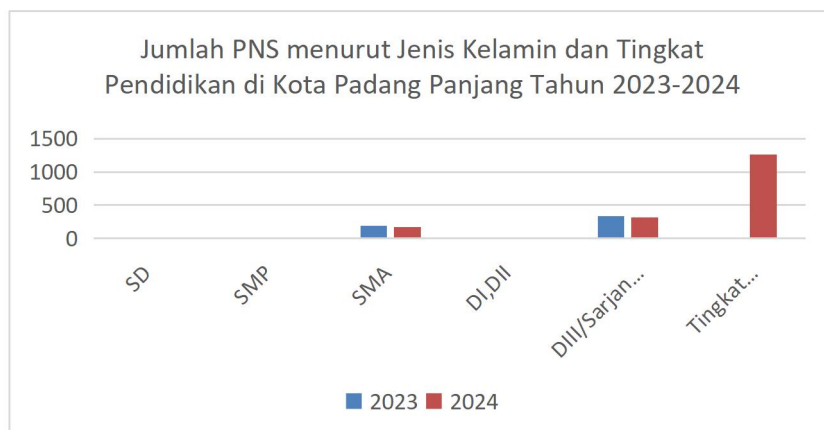
menjalankan kinerjanya. Gambaran tingkat pendidikan ASN Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 36. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024

No	Pendidikan	2023		2024	
		L	P	L	P
1	SD	8	1	7	1
2	SMP	18	2	17	2
3	SMA	131	64	118	52
4	DI,DII	6	8	5	8
5	DIII/Sarjana Muda	75	260	68	247
6	Tingkat Sarjana/Doktor/Phd	444	817	448	812
	Jumlah	682	1152	663	1122

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Data pada tabel 36 menunjukkan bahwa ASN perempuan Tahun 2024 lebih banyak yang berpendidikan S1/Doktor/Phd, yakni sebesar 812 orang atau sebesar 72,37%. Di bandingkan ASN Laki-laki dengan S1/Doktor/Phd dengan jumlah 448 orang atau sebesar 67,57%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum kualitas ASN perempuan dilihat dari aspek pendidikan sudah jauh lebih baik. Dengan kualitas pendidikan yang demikian diharapkan kontribusi dan promosi ASN perempuan dapat setara dengan ASN laki-laki. Sehingga potensi ASN perempuan dapat diberdayakan sebagai sumberdaya pembangunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 30.



Gambar 30. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2024

Data selanjutnya adalah pekerjaan sebagai Sekretaris OPD. Sekretaris OPD lebih banyak dijabat oleh laki-laki. Sekretaris dalam jabatan-jabatan tertentu sangat jarang dipegang oleh perempuan. Misalnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan lain-lain. Jabatan Sekretaris OPD di Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Sekretaris OPD menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN			
		L	P	DIII	S1	S2	S3
1	Inspektorat	√				√	
2	BAPPEDA						
3	BPKD	√			√		
4	BKPSDM	√			√		
5	BPBD KESBANG POL						
6	DISDUKCAPIL	√				√	
7	DINAS PM DAN PTSP		√			√	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	√				√	
9	DINAS PUPR	√				√	
10	DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A		√			√	
11	DINAS KOMINFO	√			√		
12	DINAS PERINDAGKOP UKM		√				√
13	DINAS PERKIM LH		√			√	
14	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN	√				√	
15	DINAS PEMUDA OLAHRAHA DAN PARIWISATA	√			√		
16	DINAS KESEHATAN		√			√	
17	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	√			√		
18	DINAS PERHUBUNGAN	√				√	
19	POL PP DAN DAMKAR	√				√	
Jumlah		12	5		5	11	1

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024

Data tabel 37 menunjukkan bahwa dari 19 jabatan Sekretaris pada OPD terdapat 12 orang laki-laki 5 orang perempuan, dan dari data di atas pendidikan yang terbanyak yaitu S2 sebanyak 11 orang.

Representasi perempuan dalam Lembaga Eksekutif juga dapat dilihat dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Padang Panjang tahun 2024.

Tabel 38. Tim Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

No	Kota/Tahun	Pengurus dan Anggota Tim Baperjakat
----	------------	-------------------------------------

		Laki-laki	Perempuan
1	Padang Panjang 2022	5	-
2	Padang Panjang 2023	5	-
3	Padang Panjang 2024	5	-

Sumber : BKPSDM Tahun 2024.

Data tabel 38 menunjukkan bahwa terdapat lima orang pejabat di Baperjakat Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2022,2023, dan 2024 semua pejabat adalah laki- laki tidak ada perempuan dalam 3 tahun terakhir ini.

Selanjutnya representasi perempuan juga dapat dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai pimpinan Kelurahan sebagai level pemerintahan terendah di Kota. Data keterlibatan perempuan dalam pimpinan Kelurahan atau menjabat sebagai Lurah dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Jumlah Kepala Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	KELURAHAN	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	EKOR LUBUK	1	0	1	0	1	0
2	NGALAU	1	0	1	0	1	0
3	GANTING	1	0	1	0	1	0
4	SIGANDO	1	0	1	0	1	0
5	KOTO KATIK	1	0	1	0	1	0
6	KOTO PANJANG	1	0	1	0	1	0
7	TANAH PAK LAMBIAK	1	0	1	0	1	0
8	GUK MALINTANG	1	0	1	0	1	0
9	SILAING ATAS	1	0	1	0	1	0
10	SILAING BAWAH	1	0	1	0	1	0
11	BUKIT SURUNGAN	1	0	1	0	1	0
12	PASAR USANG	1	0	1	0	1	0
13	KAMPUNG MANGGIS	1	0	1	0	1	0
14	TANAH HITAM	1	0	1	0	1	0
15	PASAR BARU	1	0	1	0	1	0
16	BALAI BALAI	1	0	1	0	1	0

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024

Data tabel 39 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak satupun Lurah perempuan dari 16 Kelurahan yang ada. Hal ini patut untuk menjadi perhatian dalam pemberdayaan perempuan bidang politik dan kepemimpinan. Karena keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan merupakan indikator adanya keadilan dan

kesetaraan gender serta salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

D. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik

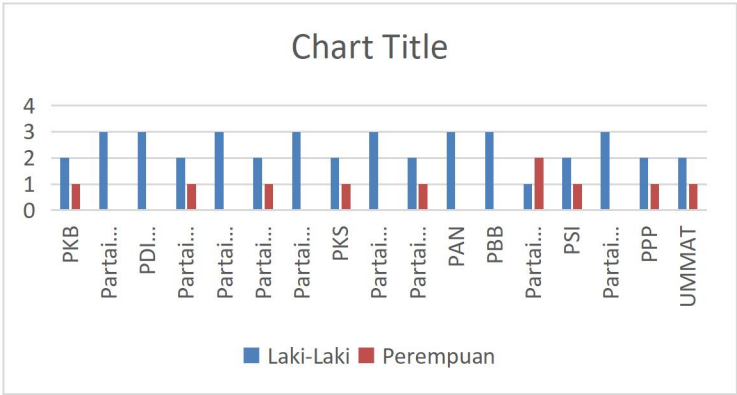
Keterlibatan perempuan dalam politik, juga dilihat dari representasinya dalam organisasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, pengurus partai juga disyaratkan memenuhi kuota 30 persen. Bila dilihat dari data pada tabel 45, secara umum kepengurusan partai politik di Kota Padang Panjang telah memenuhi syarat 30 persen perempuan, kecuali partai PKPI. Persentase representasi perempuan pada kepengurusan partai politik khususnya di level DPC Kota Padang Panjang secara berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah, PKB (33%), PKS (33%), Partai Golkar (33%), Partai Demokrat (67%), PPP (33%) Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 40.

Tabel 40. Pengurus Partai Politik di Level DPC menurut jenis kelamin di Kota Padang Panjang tahun 2024

No	Partai	DPC				Total
		L	%	P	%	
1	PKB	2	67	1	33	3
2	PARTAI GERINDRA	3	100	0	0	3
3	PDI PERJUANGAN	3	100	0	0	3
4	PARTAI GOLKAR	2	67	1	33	3
5	PARTAI NASDEM	3	100	0	0	3
6	PARTAI BURUH	2	67	1	33	3
7	PARTAI GELOLA	3	100	0	0	3
8	PKS	2	67	1	33	3
9	PARTAI HANURA	3	100	0	0	3
10	PARTAI GARUDA	2	67	1	33	3
11	PAN	3	100	0	0	3
12	PBB	3	100	0	0	3
13	PARTAI DEMOKRAT	1	33	2	67	3
14	PSI	2	67	1	33	3
15	PARTAI PERINDO	3	100	0	0	3
16	PPP	2	67	1	33	3

17	UMMAT	2	67	1	33	3
Total		41		10		51

Sumber: KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024



Gambar 31. Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

E. Pengurus dan Anggota Kaukus Perempuan Politik

Berdasarkan data dari Dinas Sosial P2KBP3A terdapat 22 orang pengurus Kaukus Perempuan Politik. Kaukus perempuan politik bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik khususnya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD. Keberadaan kaukus perempuan politik diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Informasi tentang kondisi penghuni Lapas berdasarkan jenis kelamin sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan perlunya perlakuan khusus sesuai kebutuhan gender, laki-laki maupun perempuan termasuk anak. Perbedaan gender perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan dan program Lapas, sehingga dapat diwujudkan keadilan gender terhadap penghuni Lapas. Misalnya penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan perempuan dalam melindungi hak dan Kesehatan reproduksinya. Demikian juga dengan Lapas anak yang perlu mempertimbangkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Gambaran penghuni Lapas di Kota Padang Panjang dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 41.

Tabel 41. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Pendidikan	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	SD	29	-	58	-	54	-
2	SLTP	49	-	32	-	33	-
3	SLTA	54	-	67	-	49	-
4	PT	14	-	9	-	13	-
	Jumlah	146	-	168	-	154	-
	Jumlah Total	146		168		154	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 41, Angka Jumlah Penghuni Lapas (AJPL) Tahun 2024 sebanyak 154 orang. Pada Tahun 2024 AJPL tidak ada penghuni Lapas perempuan, sementara AJPL laki-laki sebanyak 168 orang tahun 2023. AJPL ini meningkat dari AJPL Tahun 2022 adalah sebanyak 146 orang, Data ini juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan penghuni Lapas Tahun 2024 Menurun dibanding Tahun 2023 yang sama sekali tidak ada perempuan penghuni Lapas. Namun jumlah laki- laki masih banyak terlibat kejahatan

sehingga mengakibatkan mereka menjadi penghuni Lapas. Banyaknya laki-laki yang menjadi penghuni Lapas juga akan berdampak terhadap perempuan, terutama bila penghuni Lapas adalah sorang suami atau ayah. Kondisi ini akan berakibat terhadap meningkatnya beban perempuan/istri dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga selama suami/ayah berada di lapas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban ekonomi, sosial dan psikologis ketika suaminya di Lapas. Bila dilihat dari tingkat pendidikan AJPL, tingkat pendidikan SD lebih banyak menjadi penghuni Lapas, selanjutnya tingkat pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi. Hal ini juga perlu menjadi perhatian apakah tingkat Pendidikan yang rendah menjadi penyebab pelaku kejahatan melakukan kejahatan.

Banyaknya laki-laki yang menjadi penghuni Lapas perlu menjadi perhatian. Karena apabila laki-laki tersebut berstatus sebagai kepala keluarga, maka akan berdampak terhadap kehidupan keluarga, perempuan sebagai istri, dan terhadap anak-anak. Selain itu, ketika seorang suami sebagai Kepala Keluarga menjadi tahanan/narapidana tidak hanya berdampak secara ekonomi kepada perempuan dan anak tetapi juga berdampak sosial dan psikologis.



Gambar 32. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

Selanjutnya penghuni Lapas dapat dilihat berdasarkan sebaran kelompok umur sebagaimana pada data tabel 42.

Tabel 42. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Penghuni Lapas	Kelompok Umur 2024								
		5-12	13-17	18-22	23-27	28-31	31-35	36-40	41-49	>50
1	Laki-Laki	-	3	21	31	21	15	28	41	25
2	Perempuan	-	1	-	1	-	-	1	2	-
	Total	-	4	21	32	21	15	29	43	25

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 42 menunjukkan bahwa kelompok umur 41-49 merupakan kelompok umur terbanyak sebagai penghuni Lapas yakni 43 orang atau 22,63 persen dari jumlah penghuni Lapas. Artinya pelaku kejahatan semakin mengarah ke umur dewasa. Data ini memberi gambaran bahwa penghuni Lapas adalah mereka yang masih berusia produktif. Kondisi ini akan sangat berdampak terhadap keluarga dan anak-anak yang memerlukan orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi dan pendidikan mereka. Bagi kelompok yang berusia muda hal ini akan berdampak terhadap masa depan mereka karena pada usia muda yang seharusnya mulai memiliki kemandirian hidup, namun harus mendekam di Lapas.



Gambar 33. Jumlah Penghuni Lapas berdasarkan kelompok Umur Kota Padang Panjang tahun 2024

BAB VIII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Korban Kekerasan terhadap Perempuan

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal CEDAW telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Oleh karena itu pemerintah senantiasa mengupayakan kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap perempuan. Beberapa di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah: (1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual, (2) menangani, melindungi, dan memulihkan korban, (3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, (4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan (5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Upaya-upaya pemerintah tersebut dilakukan karena masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih merupakan fenomena gunung es. Dikatakan demikian karena jumlah kasus yang ada di dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus yang terungkap ke publik. Persoalan ini terjadi karena isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan/pelecehan seksual merupakan isu yang saling berkaitan dengan nilai-nilai patriarki. Kemauan dan keberanian korban maupun para pemerhati masalah perempuan untuk melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian dan respon yang baik. Karena dengan adanya data, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan menanganinya. Keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai Patriarki telah menempatkan perempuan dan masalah-

masalah yang dialaminya pada posisi relatif tertutup, privat dan dianggap “Aib”. Dampaknya masyarakat dan korban menganggap persoalan tersebut tidak baik bila diberitahu kepada orang lain apalagi menyangkut nama baik keluarga, kelompok dan Daerah. Di Kota Padang Panjang Korban kekerasan dapat dilihat pada data tabel 43.

Table 43. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Umur Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelompok			Jumlah
		Anak (0-18 Thn)	Remaja (18-25 Thn)	25 Thn keatas	
1	Padang Panjang Barat	-	1	3	4
2	Padang Panjang Timur	-	1	5	6
Jumlah		-	2	8	10

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024

Data tabel 43 menunjukkan terdapat 10 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan tercatat sepanjang Tahun 2024 dan tersebar pada dua Kecamatan. Secara rinci data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kasus pada usia anak (0-18 tahun), di kasus remaja (18-25 tahun) ada 2 kasus, dan ada 8 kasus terhadap perempuan dewasa. Dilihat dari sebaran kasus per Kecamatan, kasus terbanyak ada di Kecamatan Padang Panjang Timur yakni sejumlah 6 kasus atau 60% persen.

Tabel 44. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		Paud	SD	SLTP	SLTA	PT	
	Kota Padang Panjang	-	-	-	8	2	10

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Data tabel 44 menunjukkan Perempuan korban kekerasan dilihat dari sisi pendidikan yang dicapai didominasi oleh perempuan yang berpendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi sebanyak 10 orang.

Tabel 45. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022			2023			2024		
		Blm kawin	Kawin	Cerai	Blm kawin	Kawin	Cerai	Blm kawin	Kawin	Cerai
1	Padang Panjang Barat	0	0	0	0	2	0	1	3	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0	1	2	0	0	6	0
	Jumlah	0	0	0	0	4	0	1	9	0

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Perempuan korban kekerasan di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 pada umumnya adalah mereka yang masih dalam status belum kawin yakni sebanyak 1 orang, 9 orang dalam status kawin, dan terdapat kekerasan dalam status cerai.

Data ini menggambarkan bahwa korban kekerasan dalam status belum kawin atau anak, ada kemungkinan mereka adalah korban pelecehan dan kekerasan seksual sebagaimana yang cukup banyak terjadi di dalam keluarga. Sedangkan kekerasan yang dialami perempuan dalam status kawin besar kemungkinan adalah dalam kategori KDRT. Dibandingkan dengan data Tahun 2022, dan data Tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2024. Angka ini dapat digolongkan menjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kebanyakan kekerasan yang di terima di sebabkan oleh faktor ekonomi.



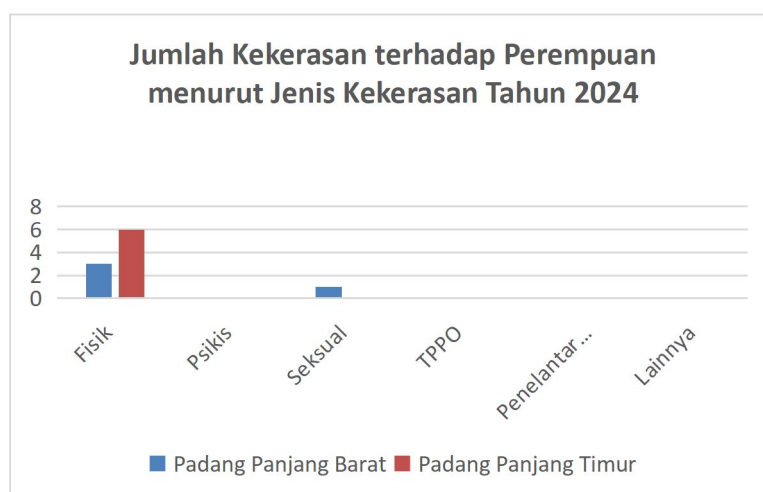
Gambar 34. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan

Tabel 46. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Padang Panjang Barat	3	0	1	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	6	0	0	0	0	0
Jumlah		9	0	1	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari beberapa kategori seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi atau penelantaran, verbal, dan simbolik. Berdasarkan data yang tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2024 kekerasan terhadap perempuan yang dicatat adalah sebanyak 10 kasus. 9 diantaranya adalah kasus kekerasan fisik. Selain itu juga ada kekerasan seksual yakni 1 kasus, kekerasan psikis dan penelantaran. Sebaran data dapat dilihat pada tabel 46 di atas.



Gambar 35. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis Kekerasan

B. Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan perlu menjadi perhatian khusus karena pelaku dan korban adalah jenis kelamin yang berbeda. Secara relasi kuasa, kekerasan berbasis gender ini selalu terjadi karena dominasi salah satu jenis kelamin. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki, dan korbannya adalah perempuan. Sangat sedikit terjadi sebaliknya dimana perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban. Namun perempuan cukup banyak menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa kekerasan oleh Ibu terhadap anak adalah dampak dari ketertekanan Ibu dalam keluarga. Kekerasan terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, ayah, paman, kakak, tetangga, guru dan lainnya. Perempuan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan biasanya berkaitan dengan hubungan perkawinan dengan suami, atau kepada anak.

BAB IX TUMBUH KEMBANG

A. Jumlah Peserta PAUD

Anak adalah aset masa depan. Keberlangsungan suatu bangsa sangat tergantung kepada kualitas generasinya, yang dimulai dari masa bayi, dan balita. Oleh karena itu tumbuh kembang Anak Usia Dini menjadi perhatian serius dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, karena SDM masa depan sangat ditentukan oleh kualitas anak pada masa tumbuh kembang. Kepesertaan anak pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Di Kota Padang Panjang kepesertaan anak pada PAUD dapat dilihat pada data tabel 47.

Tabel 47. Jumlah Peserta Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun 2022		L+P	Tahun 2023		L+P	Tahun 2024		L+P
		L	P		L	P		L	P	
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	612	569	1181	612	569	1181	590	543	1.133
2	Tempat Penitipan Anak (TPA)	122	109	231	122	109	231	123	124	247
3	Kelompok Bermain (KB)	503	452	955	503	452	955	471	453	924
4	Satuan PAUD Sejenis	0	0	0	0	0	0	20	22	42
	Jumlah	1237	1130	2367	1237	1130	2367	1204	1142	2346

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 47 dapat dilihat jumlah peserta PAUD Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebanyak 2367 orang anak yang menjadi peserta PAUD yang terdiri dari berbagai kelompok seperti: Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), serta Kelompok Bermain (KB). Kepesertaan PAUD sama banyak dengan tahun 2023 sebanyak 2367 orang. Data tabel di atas juga menunjukkan bahwa tahun 2022 dan 2023 jumlah peserta PAUD tetap. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah peserta PAUD menurun menjadi 2346 orang.

Keikutsertaan paling banyak adalah paling banyak adalah pada kategori Taman Kanak-Kanak yaitu 1.133 anak pada Tahun 2024, tetapi dari tahun sebelumnya menurun dari tahun 2022 dan 2023 yang hanya 1.181 anak. Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 36. Jumlah Peserta PAUD di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

B. Jumlah Lembaga PAUD

Tabel 48. Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Non-Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
		TK	TPA	KB	SPS	TK	TPA	KB	SPS	TK	TPA	KB	SPS
1	Padang Panjang Barat	10	2	15	0	10	2	15	0	10	2	14	0
2	Padang Panjang Timur	9	4	18	0	9	4	17	0	9	4	17	0
	Total	19	6	33	0	19	6	32	0	19	6	31	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Data pada tabel 48 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 terdapat 19 TK yang tersebar di Padang Panjang Barat sebanyak 10 buah, di

Padang Panjang Timur sebanyak 9 buah. TPA berjumlah 6 buah, 2 buah terdapat di Padang Panjang Barat, dan 4 buah di Padang Panjang Timur. Sementara KB berjumlah 31 buah, tersebar 14 buah di Padang Panjang Barat, dan 17 buah di Padang Panjang Timur.



Gambar 37. Jumlah Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non Formal Tahun 2022-2024

BAB X KELANGSUNGAN HIDUP

A. Angka Kematian Bayi

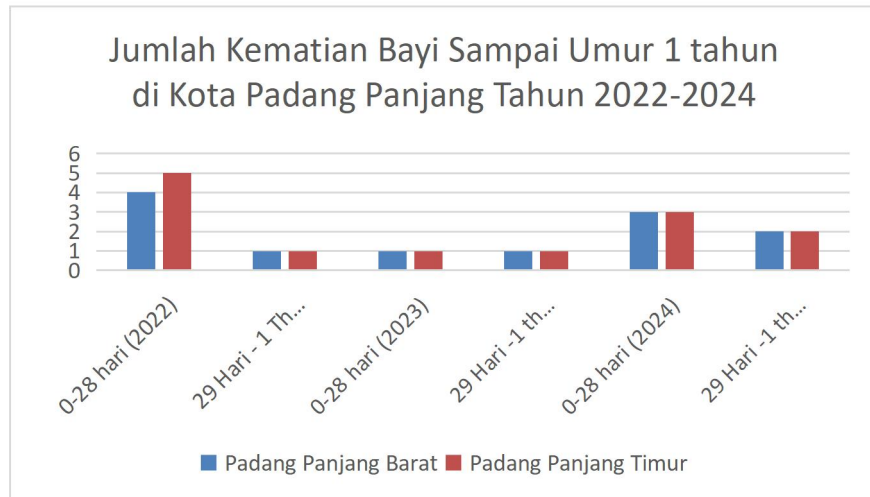
Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 49. Jumlah Kematian Bayi Sampai Umur 1 tahun di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

Kecamatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	0-28 Hari	29Hari-1th	0-28 hari	29hari-1th	0-28 hari	29hari-1th
Padang Panjang Barat	4	1	1	1	3	2
Padang Panjang Timur	5	1	2	0	5	1
Kota Padang Panjang	9	2	3	1	8	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Data tabel 49 menunjukkan AKB Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 sebanyak 11 orang. Angka ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Antisipasi kematian bayi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesehatan ibu dan pemenuhan gizi ibu, terutama pada masa kehamilan.



Gambar 38. Jumlah Kematian Bayi Sampai Umur 1 tahun di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

B. Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan tentang Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan imunisasi adalah hak anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah wajib memelihara kesehatan anak termasuk dengan melakukan vaksinasi anak. Imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi terdiri dari satu kali imunisasi Hepatitis B (HB), satu kali imunisasi tuberkulosis (BCG), tiga kali imunisasi Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, serta Pneumonia (DPT-HB-Hib), empat kali imunisasi Polio, dan satu kali imunisasi Campak (MR).

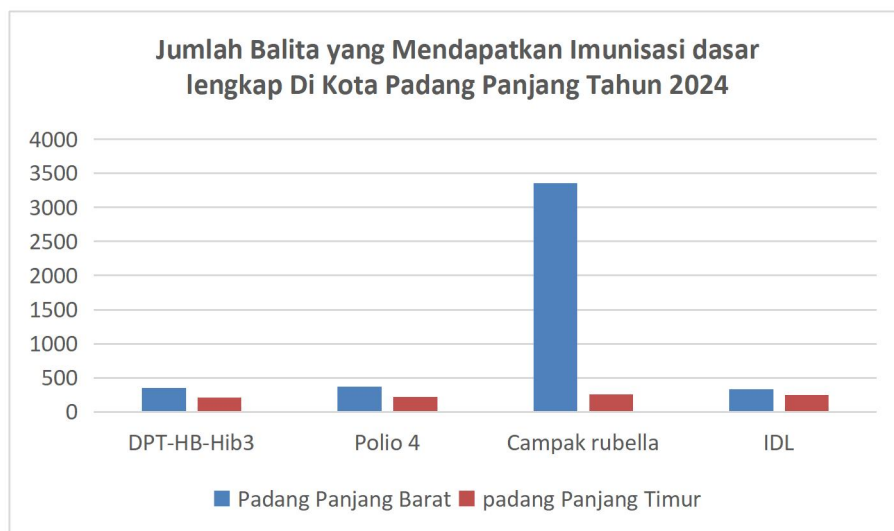
Tabel 50. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi dasar lengkap Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	DPT-HB-Hib3	POLIO 4	CAMPAK RUBELLA	IDL
1	Padang Panjang Barat	349	371	353	336
2	Padang Panjang Timur	208	222	256	249
	JUMLAH	557	593	609	585

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 50 menunjukkan jumlah Balita yang mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 2.344 orang dengan rincian 557 orang mendapatkan DPT-HB-Hib3, 593 orang Mendapatkan imunisasi POLIO 4, yang

mendapatkan imunisasi Campak Rubella sebanyak 609 orang, dan yang mendapatkan IDL sebanyak 585 orang. Jumlah tersebut hampir merata pada semua jenis imunisasi yang harus didapatkan, Polio, Campak, dan DPT3 + HB3 dan IDL.



Gambar 39. Jumlah Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

C. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Di Imunisasi

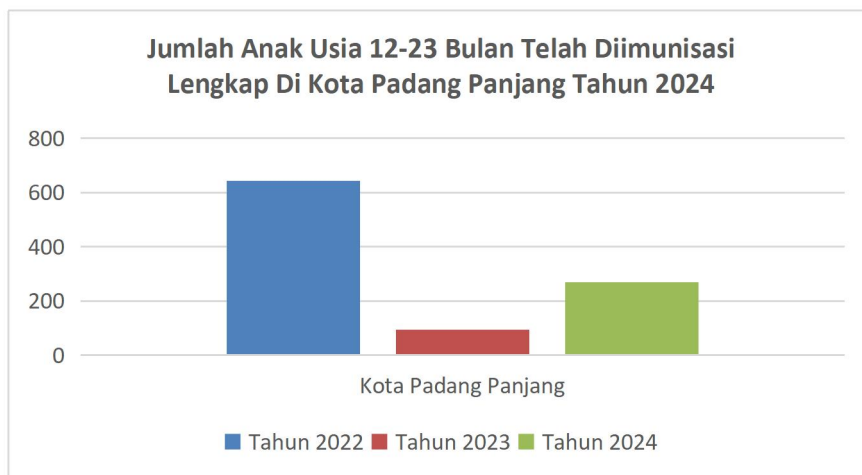
Tabel 51. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Anak Tahun 2022	Jumlah Anak Usia Tahun 2023	Jumlah Anak Usia Tahun 2024
1	Kota Padang Panjang	644	95	269

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 51 menunjukkan jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebanyak 644 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2023 jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang sebanyak 95 jiwa dan pada Tahun 2024 sebanyak 269 jiwa. Jika dibanding Tahun 2023 jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi pada Tahun 2024 mengalami Peningkatan yang sangat drastis sebesar 269 dan dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 644 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa di tahun

2023 sedikit sekali jumlah anak usia 12-23 bulan yang di imunisasi ini perlu diperhatikan dan perlu sosialisasi pentingnya imunisasi untuk imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit.



Gambar 40. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap Di Kota Padang Panjang Tahun 2022- 2024

D. Jumlah Bayi Lahir Berat Badan Rendah

Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah kondisi dimana bayi memiliki berat badan kurang dari 2,5 kilogram saat dilahirkan. Secara fisik, bayi yang memiliki berat badan lahir rendah terlihat kurus, memiliki sedikit jaringan lemak tubuh, dan kepalanya terlihat lebih besar atau tidak proporsional. BBLR ini bisa disebabkan oleh beragam hal, biasanya sering terjadi pada bayi yang lahir prematur (sebelum memasuki usia kehamilan 37 minggu). Bayi yang berat badan lahirnya rendah rentan mengalami gangguan kesehatan, sehingga memerlukan perawatan ekstra.

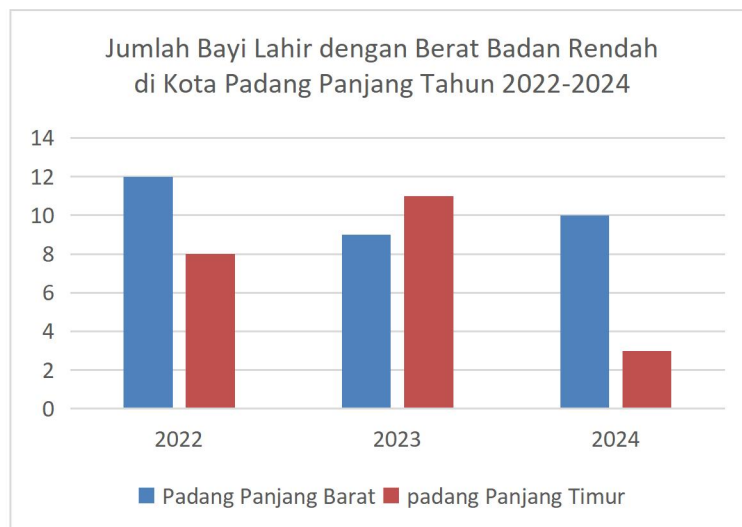
Tabel 52. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Padang Panjang Barat	12	9	10
2	Padang Panjang Timur	8	11	3
	JUMLAH	20	20	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 52 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang Tahun 2024 terdapat jumlah BBLR sebanyak 13 orang. Sedangkan Tahun 2022 sama dengan tahun 2023 terdapat jumlah BBLR sebanyak 20 orang .Jika dibandingkan tiga

tahun ini jumlah BBLR tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023.



Gambar 41. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

E. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan

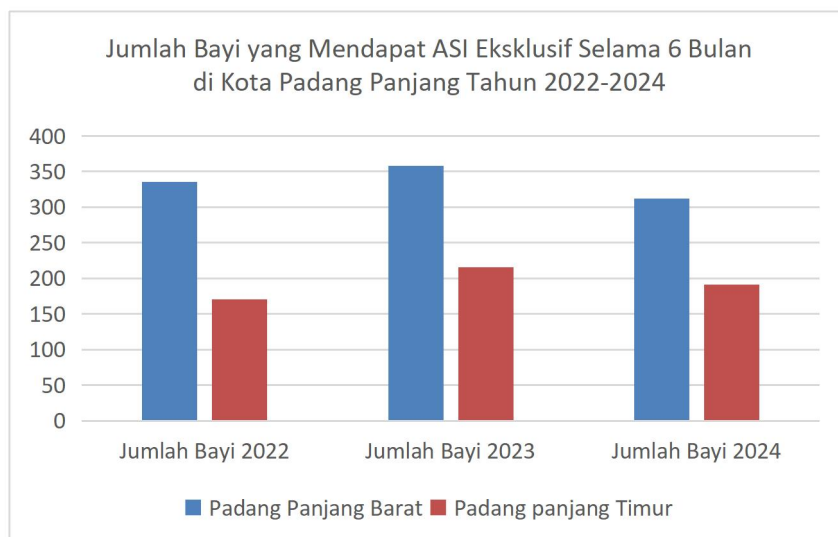
Kewajiban Ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, yang ditetapkan pada 1 Maret 2012. "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya,". Anjuran pemerintah itu dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan penuh dilakukan untuk menghindari alergi dan menjamin kesehatan bayi yang optimal.

Tabel 53. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	155	181	196	162	166	146
2	Padang Panjang Timur	92	79	109	107	100	91
JUMLAH		247	260	305	269	266	237

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebanyak 503 orang. Sedangkan di Tahun 2023 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan sebanyak 574 orang dan tahun 2022 yakni sebanyak 507 orang.



Gambar 42. Jumlah Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

F. Jumlah Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Permasalahan gizi buruk pada balita terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Marasmus, yakni kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian, (2) Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan gizi yang penyebab utamanya karena rendahnya asupan protein, dan (3) Marasmik-kwashiorkor, yakni bentuk lain dari gizi buruk pada balita yang menggabungkan kondisi dan gejala antara marasmus dan kwashiorkor.

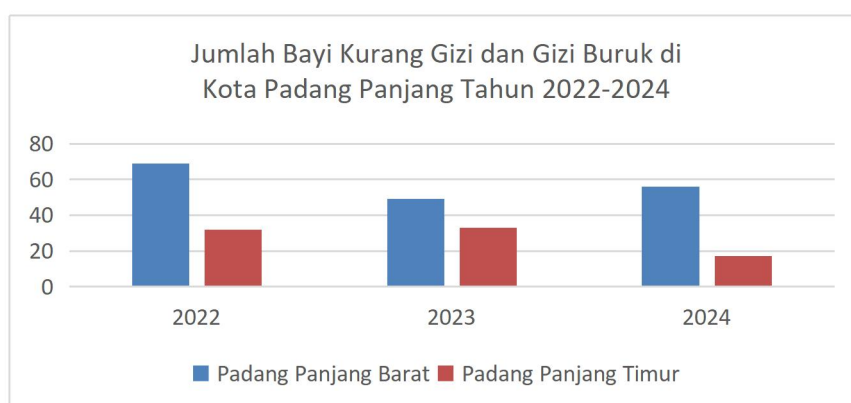
Tabel 54. Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	51	18	27	22	33	23
2	Padang Panjang Timur	15	17	17	16	7	10

	JUMLAH	66	35	44	38	40	33
--	--------	----	----	----	----	----	----

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 54 memperlihatkan bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2024 tercatat sebanyak 73 orang. Sedangkan Tahun 2023 bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang tercatat sebanyak 82 orang dan pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 101 orang. Jika dibandingkan tiga tahun ini jumlah bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2022 mengalami peningkatan begitu drastis.



Gambar 43. Jumlah Bayi Kurang Gizi Dan Gizi Buruk Di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

G. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2021

Inveksi HIV diderita berbagai kalangan dan usia, termasuk anak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 3 persen dari penderita HIV-AIDS di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 14 tahun. *Human immunodeficiency virus* adalah virus yang menyerang sel yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia sehingga mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Sementara itu, istilah *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS) adalah stadium lanjut dari infeksi HIV yang ditandai oleh kumpulan gejala klinis berat berupa berbagai infeksi oportunistis. Anak yang terinfeksi HIV belum tentu menderita AIDS. Anak terinfeksi HIV yang mendapatkan pengobatan teratur sejak dini dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu perlu perhatian serius agar anak tidak tertular HIV/AIDS.

Tabel 55. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Data tabel 55 pada Tahun 2024 menunjukkan tidak ada anak usia 0-18 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang. Kondisi seperti ini perlu dipertahankan agar kelangsungan hidup anak dapat terjamin dengan baik.

BAB XI

PERLINDUNGAN ANAK

A. Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu berbagai upaya untuk keberlangsungan dan perlindungan hidup anak senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Secara yuridis perlindungan terhadap anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan terhadap anak juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam mencegah perkawinan anak. Selain itu pemerintah juga telah menginisiasi Sekolah Layak Anak, dan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

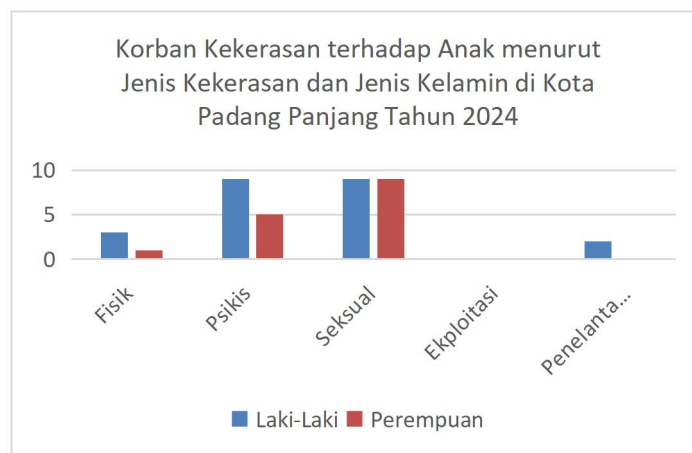
Semua undang-undang tersebut dalam rangka menjamin hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, penelantaran serta perlakuan diskriminatif lainnya. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Data kekerasan terhadap anak dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat dan bahkan di lingkungan yang seharusnya memberi perlindungan kepada anak, seperti di dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Kekerasan terhadap anak di Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 56.

Tabel 56. Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan									
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploritasi		Penelantaran	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	2	1	7	5	4	5	0	0	1	2
2	Padang Panjang Timur	1	0	2	0	5	4	0	0	1	1
	Total	3	1	9	5	9	9	0	0	2	3

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Data tabel 56 menunjukkan terdapat 41 kasus kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan fisik yang dialami oleh 3 orang anak dan 1 orang anak perempuan, kekerasan psikis 9 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan, kekerasan seksual oleh 9 orang anak laki-laki, dan 9 orang anak perempuan dan penelantaran dialami oleh 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan pada tahun 2024 tidak terdapat kasus eksploitasi anak. Kekerasan terhadap anak Tahun 2024 relatif berbeda dengan Tahun 2024. Secara grafis data korban kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada gambar 44.



Gambar 44. Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

B. Anak Jalanan

Anak jalanan menjadi perhatian khusus pemerintah sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak-anak yang berada di jalanan dengan berbagai aktifitas dan bahkan sepanjang hari berada di jalanan. Kondisi ini sangat berlawanan dengan apa yang seharusnya terjadi pada anak yakni menjalani kehidupan yang nyaman di dalam keluarga, bersekolah dan lain-lain sesuai usia mereka sebagai anak. Secara definitif Kementerian Sosial RI Tahun 2005 mendefinisikan anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan penghasilan yang dipergunakan untuk diri sendiri dan untuk membantu keluarga, serta yang hanya berkeliaran di jalanan.

Secara teoritis, terdapat tiga kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga yaitu: *Children on the street*, *Children of the street*, *Children in the street*. Yang pertama *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarga. Kategori kedua, *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, mereka tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua/keluarganya. Kategori ketiga, *Children in the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Ketiga kategori tersebut sama-sama membawa dampak buruk bagi kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir anak berada di jalanan baik yang berkegiatan ekonomi, apalagi yang hanya sekedar menghabiskan waktu di jalanan.

Anak jalanan perlu mendapatkan perhatian karena kehidupan di jalanan membuat mereka kehilangan sebagian hak-haknya sebagai anak. Misalnya kehilangan hak untuk sekolah, memperoleh kasih sayang, bermain, dan lain-lain. Seringkali anak jalanan jauh dari perlindungan hukum. Mereka akan sangat rentan terpapar penyakit, kejahatan, serta perlakuan-perlakuan diskriminatif. Di Kota Padang Panjang Tahun 2024 berdasarkan data yang tersedia di DP2KBP3A tidak ada anak jalanan. Kondisi ini harus tetap dapat dipertahankan sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diberikan sebagaimana mestinya.

Tabel 57 menggambarkan hal tersebut.

Tabel 57. Jumlah Anak Jalanan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

C. Pekerja Anak

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, secara hukum anak tidak boleh dipekerjakan, apalagi dieksploitasi. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Sejauh ini di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021-2023 tidak ada anak-anak yang dipekerjakan baik oleh orang tua maupun perusahaan.

Tabel 58. Jumlah Pekerja Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1.	Padang Panjang	3	3	2	2	3	2

	Barat						
2.	Padang Panjang Timur	4	3	3	3	2	2
	Jumlah	7	6	5	5	5	4

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

D. Pekerja Rumah Tangga Anak

Pekerja rumah tangga identik dengan perempuan, sehingga dalam cukup banyak kasus, anak perempuanpun juga dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga baik yang dibayar maupun sebagai pekerja rumah tangga yang tidak dibayar. Di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 tidak ada pekerja rumah tangga anak.

Tabel 59. Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

E. Anak Terlantar

Anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Data Tahun 2024 di Kota Padang Panjang terdapat sebanyak 94 orang anak terlantar yang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 42 orang perempuan.

Peningkatan ini perlu mendapat perhatian agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi. Apabila orang tua mereka tidak mampu maka kebijakan dan program seperti PKH akan dapat membantu memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Selain itu program-program bantuan pendidikan, panti-panti asuhan dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan anak terlantar. Untuk lebih jelasnya data

tersebut dapat dilihat pada tabel 60.

Tabel 60. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	3	3	2	2	30	14
2	Padang Panjang Timur	4	3	3	3	22	28
	Jumlah	7	6	5	5	52	42

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024



Gambar 45. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

F. Pekerja Anak Sektor Berbahaya

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada Tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam konvensi dan undang-undang tersebut di atas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian: (1)

Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (2) Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno; (3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan. Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut di atas, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana.

Di Kota Padang Panjang Tahun 2024 tidak ada anak yang bekerja pada pekerjaan yang berbahaya. Data tersebut dapat dilihat dalam data tabel 61.

Tabel 61. Jumlah Pekerja Anak di Sektor Bahaya Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

G. Anak Korban Eksploitasi Seksual

Salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak-anak dewasa ini adalah anak mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dapat dilakukan melalui sosial media, yang menjadikan anak sebagai pelaku pemeran video porno yang kemudian diperjual belikan secara bebas, sehingga anak dijadikan obyek seks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lahir untuk

menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian juga dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak diberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi seksual. Selain itu Undang-Undang tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 juga semakin memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial dalam beberapa peraturan perundang- undangan secara khusus diatur mengenai hal tersebut. Undang-undang

yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual komersial melalui media sosial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Di Kota Padang Panjang Tahun 2023 tidak ada kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

Tabel 62. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

H. Anak Korban Pedofilia

Pedofilia merupakan kejahatan seksual yang sangat berbahaya bagi anak, karena kejahatan dilakukan oleh orang-orang dewasa yang secara fisik, ekonomi, dan kekuasaan lebih kuat daripada anak-anak. Secara umum Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang, dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual. Kasus anak korban pedofilia terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan beberapa penelitian, perilaku pedofilia melakukan kekerasan seksual terhadap anak tidak

disebabkan oleh faktor tunggal. Di Kota Padang Panjang Tahun 2024 tidak ada kasus pedofilia. Data tabel 63 dapat menggambarkan hal tersebut.

Tabel 63. Jumlah Anak Korban Pedofilia menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024*

I. Anak Korban *Trafficking*

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam isu perdagangan orang sudah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). UU ini bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, melindungi korban, dan memastikan hukuman yang adil bagi pelaku. Anak rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan orang. Beberapa penelitian menemukan bahwa beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan anak diantaranya; faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan anak dan keluarga, serta kurangnya kepedulian orang tua terhadap pengurusan administrasi anak seperti pembuatan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan mudahnya terjadi perdagangan orang karena korban tidak memiliki identitas.

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun (Pasal 35). Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti: ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Padang Panjang

Tahun 2023 tidak ada kasus anak korban perdagangan orang. Data tabel 64 menggambarkan hal tersebut.

Tabel 64. Jumlah Anak Korban Trafficking menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024*

J. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Di Dalam kriminologi kejahatan yang dilakukan oleh anak disebut kenakalan remaja, karena anak diasumsikan tidak akan melakukan kejahatan seperti orang dewasa. Idealnya anak tidak mengalami kasus berhadapan dengan hukum, karena mereka berada dibawah pengawasan orang tua. Namun dalam realitasnya cukup banyak anak yang berhadap dengan hukum, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) karena melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan minuman keras, tawuran, balap liar, kekerasan seksual, pornografi, narkoba, pencurian, perampokan, dan lain-lain. ABH biasanya adalah anak korban dari pola asuh yang salah, kurangnya pembinaan dan pengawasan orang tua terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di Kota Padang Panjang Tahun 2024 terdapat 15 kasus anak berhadapan dengan hukum diantaranya 8 orang anak yang berhadapan dengan hukum dengan jenis kelamin Laki-laki dan perempuan sebanyak 7 orang. Tabel 65 menunjukkan hal tersebut.

Tabel 65. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	3	5	8
2	Padang Panjang Timur	5	2	7
	Jumlah	8	7	15

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024*

K. Anak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur yang menjadi perhatian dalam upaya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Dimensi gender pada disabilitas mempunyai peran penting karena perempuan disabilitas mempunyai kerentanan yang lebih berat dibandingkan disabilitas laki-laki. Perlindungan terhadap disabilitas secara hukum diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara pada ayat (5) dinyatakan bahwa perlindungan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas usia anak perlu mendapat perhatian serius karena mereka dapat dikembangkan potensinya sehingga bisa mandiri di usia dewasa. Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Padang Panjang Tahun 2024 terdapat sebanyak 94 orang anak disabilitas yang terdiri dari 52 laki-laki dan 42 perempuan.

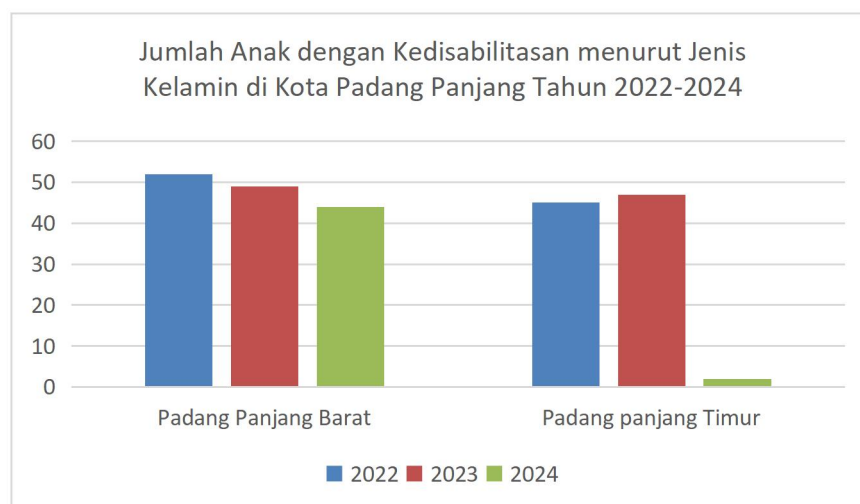
Data ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data Tahun 2022-2023 di mana Tahun 2022 terdapat 97 orang penyandang disabilitas anak yakni 57 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, sedangkan Tahun 2023 terdapat 96 anak disabilitas yang terdiri atas 56 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 66.

Tabel 66. Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	2022		Total	2023		Total	2024		Total
		L	P		L	P		L	P	
1	Padang Panjang Barat	37	15	52	34	15	49	30	14	44
2	Padang Panjang Timur	20	45	45	22	25	47	22	28	50

	Jumlah	57	40	97	56	40	96	52	42	94
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024



Gambar 46. Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

Tabel 67. Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta di Kota Padang Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama SLB Negeri dan Swasta	JUMLAH SISWA SLB NEGERI & SWASTA	
			L	P
1	Padang Panjang Barat	SLB Asih Putra	94	33
		SLB Cahaya Kemala	22	10
		SLB 1	38	26
2	Padang Panjang Timur	SLB Insan Mandiri	31	2
		SLB Mutiara Bunda	23	24
		Total	208	93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di Kota Padang Panjang terdapat 301 Sekolah Luar Biasa (SLB) di tingkat Sekolah Dasar (SD), SLTP dan SLTA. Sebaran jumlah sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel 67.

Data tabel 67 menunjukkan bahwa siswa SLB di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 sebanyak 301 siswa yang terdiri dari 5 SLB se Kota Padang Panjang, di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 3 SLB dengan jumlah siswa 223 orang dan di Padang Panjang Timur terdapat 2 SLB dengan jumlah siswa 90 orang . dari keseluruhan data menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 208 orang dan perempuan 93 orang.

BAB XII

KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK

A. Komitmen

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Secara formal PUG diadopsi dari *Beijing Platform for Action* pada konferensi PBB untuk perempuan Tahun 1995. Platform ini menyatakan bahwa: "...pemerintah dan pihak-pihak lain harus mempromosikan kebijakan *gender mainstreaming* secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki telah dilakukan". Di Indonesia secara resmi PUG dicanangkan sejak Tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Produk hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan internasional dan desakan masyarakat sipil untuk mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia merupakan salah satu strategi pembangunan. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 2000, PUG belum sepenuhnya mampu memberi manfaat yang lebih adil bagi masyarakat, terutama pada perempuan. Persoalan ketimpangan gender masih nyata. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah. IPG dan IDG yang rendah menunjukkan masih tingginya ketimpangan gender di dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan cerminan dari berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, seperti angka kematian ibu, KDRT, perdagangan orang, kemiskinan, perkawinan anak, pelecehan seksual, keterwakilan di Lembaga Legislatif, dan lain-lain.

PUG menjadi keharusan bagi setiap kantor dan lembaga baik di pusat maupun di daerah. Terdapat tujuh prasyarat awal PUG yaitu: (1). komitmen, (2). Kebijakan dan program, (3), kelembagaan PUG termasuk unit-unit kerja struktural dan fungsional, (4). Sumber Daya manusia, pendanaan dan prasarana yang memadai, (5). Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, (6). Instrumen analisis gender, dan (7). Dukungan masyarakat sipil. Implementasi PUG sejalan dengan implementasi PUHA. Di Kota Padang Panjang prasyarat PUG dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

Tabel 68. Peraturan Daerah tentang PUG dan Perlindungan Anak Anak Di Kota Padang Tahun 2024

No	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Perda	Perda Tentang Perlindungan Perempuan	7 Tahun 2015	Kantor PPKB
2	Perda	Kawasan Tanpa Asap Rokok dan KTR	8 Tahun 2009	
3	Perwako	Dispensasi Pencatatan Kelahiran	6 Tahun 2009	
4	Perwako	SPM Pendidikan PAUD	10 Tahun 2018	
5	Perwako	Pedoman Konsultasi Hukum Online	16 Tahun 2018	
6	Perwako	Pedoman Pelaksanaan PUG	26 Tahun 2018	
7	Perwako	Progran Wajib PAUD 1 Tahun Pra SD	47 Tahun 2019	
8	Perwako	Pengembangan Kota Layak Anak	10 tahun 2020	

9	SK Walikota	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Percontohan Kota Padang Panjang Tahun 2019.	No. 188.45-74-2016	
10	SK Walikota	Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kota Padang Panjang.	No.27 Tahun 2019	
11	SK Walikota	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.	No.70 Tahun 2019	
12	SK Walikota	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dan Anak Gender dan Anak Tahun 2020.	No. 83 Tahun 2020	
13	SK Walikota	Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Panjang.	No.33 Tahun 2020	
14	SK Walikota	Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023.	Nomor 21 Tahun 2020	
15	Surat Edaran	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.	Nomor : SE-900/401/BPKD/X/2020	
16	Surat Edaran	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang.	Nomor 149 Tahun 2020	
17	Surat Edaran	Integrasi Perencanaan Responsif Gender dalam Renstra dan Renja OPD	No. : B/001.1/639 /BAPPEDA/-PP/XII/2019	
18	BAPPEDA	Pembentukan Tim Teknis Pengurusutamaan Gender Kota Padang Panjang 2020	No 050/21/bappeda – pp /th.2020	

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

B. Kebijakan dan Program

Kota Padang Panjang mempunyai kebijakan dan program terkait dengan pengarusutamaan gender yang diinisiasi oleh DP2KBP3A. terdapat dua kegiatan.

Tabel 69. Jumlah dan Jenis Kebijakan dan Program yang terkait Pengarusutamaan Gender Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No.	Kota	Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan	Sasaran	Instansi
1	Padang Panjang	Penyusunan buku Profil gender dan Anak 2024	SKPD	DPA Dinas Sosial P2KBP3A
2	Padang Panjang	Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Fasilitas PUG/PPRG	SKPD	DPA Dinas Sosial P2KBP3A

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

C. Kelembagaan

Prasyarat berikut dari PUG dan PUHA adalah kelembagaan. Di Kota Padang Panjang terdapat dua kelembagaan PUG dan PUHA, yakni kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dan kelembagaan perlindungan anak.

Tabel 70. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kota	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	Padang Panjang	16 Kelurahan	16 Kelurahan	96	57	2

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 71. Jumlah Kelembagaan untuk Perlindungan Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kota	Gugus Tugas KLA	KPAID
1	Padang Panjang	Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

D. Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Prasarana

Pengelolaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang Panjang dilakukan di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai 4 orang

tenaga PNS terdiri dari 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki serta 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL) perempuan.

Pendanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini juga termasuk dalam pendanaan lembaga-lembaga OPD pada tabel 72.

Tabel 72. Pendanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang	Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Rp. 44.298.570
2	BKPSDM	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan kompetensi teknis	Rp. 800.000.000
		pengembangan sumber daya manusia	Sertifikasi, kelembagaan pengembangan, kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Rp. 720.000.000
3	PERKIM LH	Perumahan Dan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Rp. 1.589.810.600

4	PTSP	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Rp. 125.158.800
		pelayanan penanaman modal	pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	Rp. 110.956.800
5	BAPPEDA	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 70.000.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia	Rp. 35.000.000
6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan arsip dinamis Daerah	Rp. 25.000.000
		Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan 1: Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah	Rp. 241.385.230
		Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan 2: Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Rp. 170.000.000
7	SATPOL PP	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.803.840.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 70.212.000
8	Kec. PPT	program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 97.596.400

9	Kec PPB	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pemberdayaan kelurahan	Rp. 75.277.200
10	Dinas Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah	Rp. 50.000.000
11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kota Padang Panjang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	Rp. 100.000.000
12	DINAS PUPR	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan AIR minum (SPAM) di Daerah	Rp. 62.665.600
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 140.000.000
14	DINSOS	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah	Rp. 59.925.000
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Rp. 86.008.635
15	BPKD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp. 150.000.000
16	DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah	Rp. 1.291.338.300
			Penyediaan Perlengkapan jalan di Daerah	Rp. 3.684.584.150

			Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	Rp. 636.379.600
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pencatatan sipil	Pelayananan pencatatan sipil	Rp. 159.969.800
		Pendaftaran penduduk	pelayanan pendaftaran penduduk	Rp. 145.605.000
		Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi	Rp. 121.903.300
18	SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG	Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Rp. 542.520.250
19	DINAS KOMINFO	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.695.000
20	SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 773.136.000
21	DINAS PERDANGAN KOPERASI UKM KOTA PADANG PANJANG	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 75.000.000
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.926.077.300
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG	Program pengelolaan pendidikan	kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Rp. 2.460.000.000
23	INSEPKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG	Penunjang Urusan Pemrintah daerah kabupaten/kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 50.000.000
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 342.250.000
			JUMLAH	

E. Data Terpilah

Data terpilah berdasarkan gender adalah prasyarat yang harus ada dalam melaksanakan PUG. Kota Padang Panjang sudah menyusun data terpilah gender

setiap tahunnya dalam bentuk buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang sejak Tahun 2018. Buku ini merupakan kompilasi data gender dari berbagai instansi dan dilengkapi dengan analisis kualitatif. Data terpilah dan analisis gender diharapkan dapat menjadi basis dalam merencanakan kebijakan, program dan kegiatan sehingga kesenjangan gender dapat diminimalisir serta kebijaksanaan khusus bagi perempuan dapat diinisiasi. Seperti kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi.

F. Dukungan Masyarakat Sipil

Dukungan masyarakat sipil diperlukan dalam melaksanakan PUG sebagai strategi pembangunan. Dukungan masyarakat sipil di tingkat nasional berupa Forum Puspa, dan di level propinsi dikenal dengan Forkomwil PMP3A (Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Di Kota Padang Panjang partisipasi masyarakat yang sudah ada adalah Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Panjang, dan Forum Komunikasi Anak kota Padang Panjang.

Tabel 73. Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kota	Nama lembaga	ket
1	Padang Panjang	Forum Anak	Aktif
2	Padang Panjang	Forum duta gendre	Aktif
3	Padang Panjang	Persatuan Penyandang Dissabilitas Indonesia (PPDI)	Aktif
4	Padang Panjang	PIK Remaja	Aktif
5	Padang Panjang	Bina Keluarga Balita (BKB)	Aktif
6	Padang Panjang	Saka Bhakti Husada (PRamuka kesehatan)	Aktif
7	Padang Panjang		

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 73 tampak Kota Padang Panjang telah memiliki beberapa kelembagaan perlindungan. Dengan adanya lembaga-lembaga ini maka upaya perlindungan terhadap anak dan tumbuh kembangnya dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Analisis Data DKB Semester 2 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024
Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Tahun 2024
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2024
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2024
KPU Kota Padang Panjang tahun 2024
Lembaga Pemasyarakatan Kota Padang Panjang Tahun 2024
PM PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024
BPS Kota Padang Panjang Tahun 2024
Kapolres Padang Panjang Tahun 2024
Buku Padang Panjang dalam Angka Tahun 2025